

katalog : 2302002.34

INDIKATOR TINGKAT HIDUP PEKERJA/KARYAWAN D.I. YOGYAKARTA

Agustus 2019-2020



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

INDIKATOR TINGKAT HIDUP PEKERJA/KARYAWAN D.I. YOGYAKARTA

Agustus 2019-2020



Indikator Tingkat Hidup Pekerja/Karyawan Daerah Istimewa Yogyakarta Agustus 2019-2020

Indicators of Living Level of Employees Daerah Istimewa Yogyakarta August 2019-2020

ISSN : 2460-3171

No. Publikasi/Publication Number : 34000.2114

Katalog/Catalog: 2302002.34

Ukuran Buku/Book Size: 14,8 x 21 cm

Jumlah Halaman/Number of Pages: iv + 116 halaman/pages

Naskah/Manuscript:

BPS Provinsi DI Yogyakarta

BPS-Statistics of DI Yogyakarta Province

Penyunting/Editor:

BPS Provinsi DI Yogyakarta

BPS-Statistics of DI Yogyakarta Province

Desain Kover oleh/Cover Designed by:

BPS Provinsi DI Yogyakarta

BPS-Statistics of DI Yogyakarta Province

Penerbit/Published by:

BPS Provinsi DI Yogyakarta

BPS-Statistics of DI Yogyakarta Province

Pencetak/Printed by:

© BPS Provinsi DI Yogyakarta

© *BPS-Statistics of DI Yogyakarta Province*

Sumber Ilustrasi/Graphics by:

www.freepik.com, www.pixabay.com

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Prohibited to announce, distribute, communicate, and/or copy part of all this book for commercial purpose without permission from BPS-Statistics Indonesia

TIM PENYUSUN BUKU

Penanggung Jawab : Sugeng Arianto
Editor : Soman Wisnu Darma
Handani Murda
Naskah : Tutik Endari
Pengolah Data : Nur Latifah Hanum

<https://yogyakarta.aps.3p.id>

KATA PENGANTAR

Tingkat hidup pekerja merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat hidup pekerja mengindikasikan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat dan adanya kemajuan pembangunan. Tingkat hidup pekerja dapat juga dipergunakan sebagai bahan evaluasi kebijakan pengelolaan tenaga kerja dan menentukan kebijakan ketenagakerjaan di masa mendatang. Oleh karena itu, ketersediaan data tingkat hidup pekerja/karyawan harus terjaga kontinuitas dan kualitasnya.

Publikasi ini menyajikan tentang berbagai indikator yang mempengaruhi tingkat hidup pekerja/karyawan meliputi keadaan pekerja/karyawan, sektor/lapangan usaha utama, pendidikan pekerja/karyawan, rata-rata upah/gaji pekerja/karyawan, Upah Minimum Provinsi (UMP), dan pasar tenaga kerja. Sumber data utama publikasi ini adalah data dasar hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2019–2020 BPS Provinsi D.I. Yogyakarta. Disamping itu juga dilengkapi dengan data sekunder dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi D.I. Yogyakarta.

Semoga publikasi ini dapat melengkapi dan memenuhi kebutuhan data bagi penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan. Penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan publikasi ini.

Yogyakarta, Mei 2021

Badan Pusat Statistik D.I. Yogyakarta

Kepala,



Sugeng Arianto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
INFOGRAFIK	1
ABSTRAKSI.....	5
I. PENDAHULUAN	9
1.1. Latar Belakang	9
1.2. Ruang Lingkup	17
1.3. Tujuan dan Manfaat Penyusunan Publikasi	18
1.4. Sistematika Publikasi	18
II. METODOLOGI.....	19
2.1. Sumber Data	19
2.2. Konsep dan Definisi	21
III. HASIL PERHITUNGAN DAN ANALISIS	27
3.1. Tenaga kerja.....	27
3.2. Pekerja/karyawan.....	32
3.3. Pekerja/karyawan Menurut Sektor/Lapangan Usaha	44
3.4. Pekerja/karyawan menurut Pendidikan.....	52
3.5. Rata-rata Upah/Gaji Pekerja/karyawan	56
3.6. Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota	61
3.7. Pasar Tenaga Kerja	64

IV. PENUTUP.....	71
4.1. Kesimpulan	71
4.2. Saran.....	75
LAMPIRAN.....	79
DAFTAR PUSTAKA	115

<https://yogyakarta.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Sejarah Sakernas 1976 – 2020	20
Tabel 3.1.	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di D.I. Yogyakarta, Agustus 2019 dan Agustus 2020 (persen)	38
Tabel 3.2.	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Tipe Daerah di D.I. Yogyakarta Agustus 2019 dan Agustus 2020 (persen)	41
Tabel 3.3.	Persentase Pekerja/Karyawan Menurut Sektor/Lapangan Usaha Utama di D.I.Yogyakarta, Agustus 2019 dan Agustus 2020 (persen).....	46
Tabel 3.4.	Persentase Pekerja Keluarga/Tak Dibayar Perempuan Menurut Sektor/Lapangan Usaha Utama di D.I. Yogyakarta, Agustus 2019 dan Agustus 2020 (persen)	51
Tabel 3.5.	Persentase Pekerja/Karyawan Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di D.I. Yogyakarta, Agustus 2019 dan Agustus 2020 (persen).....	52
Tabel 3.6.	Rata-rata Upah/Gaji Sebulan Menurut Sektor/Lapangan Usaha di D.I. Yogyakarta, Agustus 2019 dan Agustus 2020 (Rupiah)..	57
Tabel 3.7.	Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Provinsi di D.I. Yogyakarta, Tahun 2017 – 2021 (Rupiah)	62
Tabel 3.8.	Pasar Tenaga Kerja Menurut Jenis Kelamin di D.I. Yogyakarta, 2019-2020 (orang)	67
Tabel 3.9.	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Menurut Asal Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Tahun 2020 (orang)	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Diagram Ketenagakerjaan berdasarkan <i>International Conference of Labour Statistician (ICLS)</i> ke 13	21
Gambar 3.1	Jumlah Angkatan Kerja D.I.Yogyakarta, Agustus 2019 dan Agustus 2020 (ribu orang).....	27
Gambar 3.2	Distribusi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota di D.I.Yogyakarta, Agustus 2020.....	30
Gambar 3.3	Jumlah Pengangguran dan TPT di D.I.Yogyakarta Menurut Kabupaten/Kota, Agustus 2019 dan Agustus 2020	31
Gambar 3.4	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di D.I. Yogyakarta, Agustus 2019 dan Agustus 2020 (persen)	35
Gambar 3.5	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di D.I. Yogyakarta, Agustus 2019 dan Agustus 2020 (persen)	39
Gambar 3.6	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Tipe Daerah di D.I. Yogyakarta, Agustus 2019 dan Agustus 2020 (persen)	42
Gambar 3.7	Persentase Pekerja/Karyawan Menurut Sektor/Lapangan Usaha Utama di D.I. Yogyakarta, Agustus 2019 dan Agustus 2020 (persen)	45
Gambar 3.8	Persentase Pekerja/Karyawan Menurut Sektor/Lapangan Usaha Utama dan Tipe Daerah di D.I. Yogyakarta, Agustus 2019 dan Agustus 2020 (persen)	49
Gambar 3.9	Persentase Pekerja Keluarga/Tak Dibayar Perempuan Menurut Sektor/Lapangan Usaha Utama di D.I. Yogyakarta, Agustus 2020.....	51

Gambar 3.10	Persentase Pekerja/Karyawan Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Tipe Daerah di D.I. Yogyakarta, Agustus 2020 (persen)	55
Gambar 3.11	Rata-rata Upah/Gaji Sebulan Menurut Lapangan Usaha Utama di D.I. Yogyakarta, Agustus 2020 (Ribu Rupiah)	59
Gambar 3.12	Rata-rata Upah/Gaji Pekerja/Karyawan Menurut Pendidikan yang Ditamatkan di D.I. Yogyakarta, Agustus 2020 (Ribu Rupiah)	60
Gambar 3.13	Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Provinsi di D.I. Yogyakarta tahun 2020 – 2021 (Rupiah)	63
Gambar 3.14	Pasar Tenaga Kerja Menurut Jenis Kelamin di D.I. Yogyakarta, 2020 (orang)	66
Gambar 3.15	Pencari Kerja yang Terdaftar di Disnakertrans D.I. Yogyakarta Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2020 (persen)	68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2020	81
Lampiran 2	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Tipe Daerah, 2020	82
Lampiran 3	Jumlah Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2020	83
Lampiran 4	Jumlah Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja menurut Kabupaten/Kota dan Tipe Daerah, 2020	84
Lampiran 5	TKK dan TPAK menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2020	85
Lampiran 6	TKK dan TPAK menurut Kabupaten/Kota dan dan Tipe Daerah, 2020	86
Lampiran 7	Jumlah Penduduk Bekerja menurut Kabupaten/Kota, Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Jenis Kelamin, 2020	87
Lampiran 8	Jumlah Penduduk Bekerja menurut Kabupaten/Kota, Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, dan Tipe Daerah, 2020	88
Lampiran 9	Jumlah Penduduk Bekerja menurut Kabupaten/Kota, Sektor/ Lapangan usaha dan Jenis Kelamin, 2020	89
Lampiran 10	Jumlah Penduduk Bekerja menurut Kabupaten/Kota, Sektor/ Lapangan Usaha dan Tipe Daerah, 2020	90
Lampiran 11	Jumlah Penduduk Bekerja menurut Kabupaten/Kota Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, dan Jenis Kelamin, 2020	91

Lampiran 12	Jumlah Penduduk Bekerja menurut Kabupaten/Kota, Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, dan Tipe Daerah, 2020.....	92
Lampiran 13	Jumlah Penduduk Bekerja menurut Sektor/Lapangan Usaha, Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, dan Jenis Kelamin, 2020.....	93
Lampiran 14	Jumlah Penduduk Bekerja menurut Sektor/Lapangan Usaha, Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, dan Tipe Daerah, 2020.....	94
Lampiran 15	Jumlah Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama Dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kulon Progo, 2020	95
Lampiran 16	Jumlah Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama dan Tipe Daerah di Kabupaten Kulon Progo, 2020.....	96
Lampiran 17	Jumlah Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama Dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bantul, 2020	97
Lampiran 18	Jumlah Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama dan Tipe Daerah di Kabupaten Bantul, 2020	98
Lampiran 19	Jumlah Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama Dan Jenis Kelamin di Kabupaten Gunungkidul, 2020	99
Lampiran 20	Jumlah Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama dan Tipe Daerah di Kabupaten Gunungkidul, 2020.....	100
Lampiran 21	Jumlah Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama Dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sleman, 2020.....	101
Lampiran 22	Jumlah Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama dan Tipe Daerah di Kabupaten Sleman, 2020.....	102
Lampiran 23	Jumlah Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama Dan Jenis Kelamin di Kota Yogyakarta, 2020	103

Lampiran 24	Jumlah Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama dan Tipe Daerah di Kota Yogyakarta, 2020.....	104
Lampiran 25	Jumlah Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama Dan Jenis Kelamin di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2020	105
Lampiran 26	Jumlah Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama dan Tipe Daerah di D.I. Istimewa Yogyakarta, 2020	106
Lampiran 27	Jumlah Penduduk Bekerja menurut Lapangan Usaha Utama, Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan, dan Jenis Kelamin, 2020	107
Lampiran 28	Jumlah Penduduk Bekerja menurut Lapangan Usaha Utama, Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Tipe Daerah, 2020..	108
Lampiran 29	Jumlah Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama, Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, 2020	109
Lampiran 30	Jumlah Pekerja/Karyawan menurut Status Pekerjaan Utama, Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Tipe Daerah, 2020..	110
Lampiran 31	Jumlah Pekerja/Karyawan menurut Status Pekerjaan Utama dan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan, 2020	111
Lampiran 32	Upah Minimum Provinsi menurut Kabupaten/Kota, 2020-2021	112



PENDUDUK BEKERJA D.I YOGYAKARTA, AGUSTUS 2020 2,13 juta orang MENURUN 2,22 persen



1,14 juta



1,55 juta



0,99 juta



0,57 juta

Pertanian



5,53%

Industri



29,77%

Jasa



64,70%

Pengusaha



39,52%

Buruh/ Karyawan



46,00%

Pekerja Keluarga/ Tidak Dibayar



14,48%

77,23%



22,77%

RATA-RATA UPAH PEKERJA PER BULAN D.I YOGYAKARTA, AGUSTUS 2020 SEBESAR RP. 2,16 JUTA



Rp. 1,81 juta Rp. 2,38 juta



Rp. 1,34 juta



Rp. 1,74 juta



Rp. 3,72 juta



Lapangan usaha



Pertanian

Rp. 1,13 juta



Industri

Rp. 1,83 juta

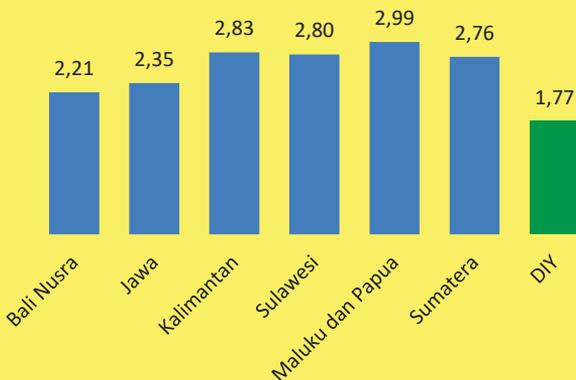
Jasa



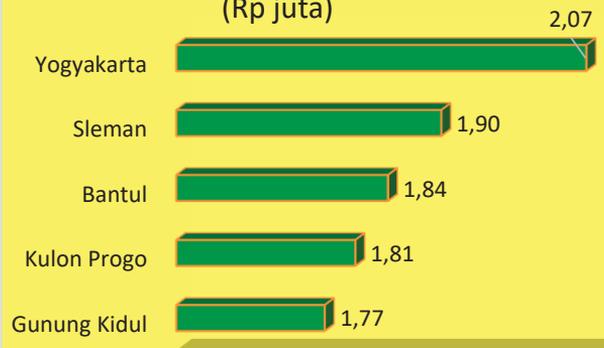
Rp. 2,39 juta

UMP DIY Terendah se Indonesia

UMP Menurut Pulau, 2021 (Rp juta)



UMK/UMP D.I. Yogyakarta, 2021 (Rp juta)



ABSTRAK

Tenaga kerja merupakan subjek sekaligus objek pembangunan sehingga memiliki posisi sentral dalam menentukan produktivitas suatu bangsa. Saat ini D.I. Yogyakarta masih mempunyai permasalahan pada bidang produktivitas tenaga kerja, karena belum memiliki wadah untuk meningkatkan kemampuan baik untuk angkatan kerja baru maupun tenaga kerja aktif, dan tidak memiliki kompetensi khusus. Hal tersebut memberikan dampaknya bahwa sebagian angkatan kerja yang dapat diserap pada lapangan kerja yang tersedia.

Tujuan penyusunan publikasi Indikator Tingkat Hidup Pekerja/Karyawan D.I Yogyakarta Agustus 2019 – 2020 adalah untuk memberikan gambaran mengenai tingkat hidup pekerja/karyawan di D.I Yogyakarta. Hasil Sakernas Agustus 2020 menunjukkan bahwa sekitar 46,00 persen penduduk yang bekerja di D.I. Yogyakarta berstatus sebagai pekerja/karyawan, baik sebagai pekerja tetap maupun pekerja bebas. Dari sisi jenis kelamin, pekerja/karyawan laki-laki sebesar 60,12 persen dan perempuan sebesar 39,88 persen. Secara umum banyaknya pekerja/karyawan menurun 12,59 persen dan secara terpilah pekerja/karyawan laki-laki menurun 4,88 persen poin sedangkan pekerja/karyawan perempuan menurun sebesar 5,67 persen poin.

Sektor S (*Services*) sampai Agustus 2020 merupakan sektor yang paling dominan menyerap pekerja/karyawan yaitu sebesar 64,70 persen, meningkat 1,00 persen poin dibandingkan kondisi Agustus 2019 sebesar 63,70 persen. Pekerja/karyawan yang bekerja di Sektor S (*Services*) pada Agustus 2020 sebesar 84,33 persen berada di perkotaan dan hanya 15,67 persen di perdesaan. Sektor M (*Manufacture*) menyerap tenaga kerja sebesar 29,77

persen, dengan rincian 74,82 persen di perkotaan dan 25,18 persen di perdesaan. Sektor A (*Agriculture*) hanya menyerap tenaga kerja sebesar 5,53 persen, dengan rincian 54,86 persen di perkotaan dan 45,14 persen di perdesaan.

Pada Agustus 2020, tingkat pendidikan pekerja/karyawan di D.I. Yogyakarta mengalami perubahan yang menggembirakan. Pekerja/karyawan yang berpendidikan SLTP ke bawah dan SLTA menurun, sedangkan yang berpendidikan Perguruan Tinggi meningkat. Untuk tingkat pendidikan SLTP ke bawah, pada Agustus 2019 sebesar 31,77 persen dan turun menjadi 29,16 persen pada Agustus 2020, sedangkan yang berpendidikan SLTA menurun dari 44,61 persen menjadi 44,01 persen. Sementara itu pekerja/karyawan dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi meningkat dari 23,62 persen menjadi 26,83 persen atau 262 ribu orang dan 56,92 persen diantaranya adalah perempuan. Nilai ini lebih tinggi dibanding pekerja/karyawan laki-laki (45,08 persen). Namun demikian, rata-rata upah yang diterima pekerja perempuan hanya sebesar Rp 1.812.408 lebih rendah dibandingkan upah pekerja laki-laki yang mencapai Rp 2.385.621. Angka tersebut nilainya masih diatas angka UMP D.I. Yogyakarta sebesar Rp 1,77 juta.

Ditinjau dari status pekerjaan, jumlah pekerja keluarga/tidak dibayar didominasi perempuan, mencapai lebih dari 3 kali lipat dibanding pekerja laki-laki. Sementara status pengusaha dan pekerja/karyawan didominasi pekerja laki-laki (93,83 persen) dibandingkan dengan pekerja perempuan (76,01 persen). Dari data ini terlihat masih adanya perbedaan upah pekerja/karyawan di D.I. Yogyakarta, untuk itu perlu dilakukan upaya strategis guna meningkatkan partisipasi dan kesejahteraan pekerja perempuan di daerah ini.

UMP D.I. Yogyakarta tahun 2021 ini sebesar 1,77 juta rupiah, menduduki ranking terendah di Indonesia. Hal ini disebabkan murahnya harga komoditas kebutuhan hidup di daerah ini, akibatnya KHL pekerja/karyawan juga lebih rendah. Rata-rata UMP di Indonesia pada tahun 2021 sebesar Rp. 2,66 juta.

<https://yogyakarta.bps.go.id>

1.1. Latar Belakang

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang penting bagi setiap negara, karena tanpa adanya tenaga kerja, faktor produksi alam dan faktor produksi modal tidak dapat digunakan secara optimal. Oleh karena itu, ketenagakerjaan harus menjadi perhatian utama pemerintah dari waktu ke waktu dengan cara memajukan dan melindungi pekerja terhadap bahaya yang dapat timbul selama bekerja. Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang dapat melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi suatu kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sesuai dengan ketentuan internasional, batas usia kerja yang berlaku di Indonesia yaitu antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun.

Penduduk usia kerja dibagi menjadi 2 kelompok yakni kelompok angkatan kerja dan kelompok bukan angkatan kerja. Angkatan kerja meliputi mereka yang sudah memiliki pekerjaan; atau memiliki pekerjaan namun sementara tidak bekerja; dan yang aktif mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha. Sementara itu yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk yang tidak bekerja; tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak mencari pekerjaan; penduduk yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja. Sedangkan penduduk di luar usia kerja yaitu berusia di bawah 15 tahun atau berusia di atas 64 tahun. Contoh kelompok ini adalah para pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, pensiunan, lanjut usia (lansia), dan anak-anak.

Dalam menjalankan kegiatan perekonomian pasti membutuhkan tenaga kerja. Kebutuhan akan tenaga kerja disebut sebagai kesempatan kerja. Jadi definisi dari kesempatan kerja merupakan tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk, jumlah angkatan kerja dan tenaga kerja juga meningkat, namun tidak diiringi dengan kesempatan kerja yang sama. Oleh karena itu, dari sekian banyak angkatan kerja ada penduduk yang tidak bekerja atau disebut sebagai pengangguran.

Kesejahteraan seluruh masyarakat pada dasarnya adalah kesejahteraan para pekerja yang mampu memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Bahkan pendapatan suatu negara baik berupa penerimaan pajak maupun penerimaan bukan pajak sesungguhnya berasal dari hasil pekerja, baik berasal dari pekerja sebagai fungsi produksi maupun pekerja sebagai fungsi konsumsi.

Masalah tenaga kerja di D.I. Yogyakarta sangat kompleks dan besar. Dikatakan kompleks karena permasalahannya mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berinteraksi dengan pola yang tidak selalu mudah dipahami. Dikatakan besar karena menyangkut jutaan jiwa. Untuk menggambarkan masalah tenaga kerja di masa yang akan datang tidaklah gampang karena selain mendasarkan pada angka tenaga kerja di masa lampau, juga harus diketahui prospek produksi di masa mendatang. Kondisi kerja yang baik, kualitas output yang tinggi, upah yang layak serta kualitas sumber daya manusia adalah persoalan yang selalu muncul dalam pembahasan tentang tenaga kerja di samping masalah hubungan industrial antara pekerja dengan dunia usaha.

Persoalan ketenagakerjaan di D.I. Yogyakarta dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya keterampilan dan keahlian yang dimiliki tenaga

kerja, latar belakang pendidikan yang rendah, lapangan kerja yang tidak sesuai, dan kurangnya kesadaran akan *entrepreneurship*. Masalah kemiskinan, ketidakmerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, dan stabilitas politik juga sangat berpengaruh terhadap ketenagakerjaan. Rucker (1985:2) sebagaimana dilansir oleh majalah Nakertrans, menduga bahwa masalah ketenagakerjaan di Indonesia bersifat multidimensi sehingga memerlukan cara pemecahan yang multidimensi pula. Tidak ada jalan pintas dan sederhana untuk mengatasinya. Strategi pemulihan dan rekonstruksi ekonomi yang bertumpu pada penciptaan lapangan kerja merupakan keharusan. Dalam kaitan ini, masih sangat relevan untuk diperhatikan secara serius dua elemen strategi yang pernah diajukan oleh Misi ILO (1999:5) yaitu (i) strategi dan kebijakan yang membuat proses pertumbuhan ekonomi menjadi lebih memperhatikan aspek ketenagakerjaan, dan (ii) tindakan yang dibutuhkan untuk mendapatkan lapangan kerja tambahan melalui program-program penciptaan lapangan kerja secara langsung.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses terjadinya kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil. Perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan *output* riil, atau bila ada kenaikan *output* perkapita. Jadi pertumbuhan ekonomi dapat menggambarkan kenaikan taraf hidup diukur dengan *output* riil per orang.

Pertambahan penduduk berarti penambahan tenaga kerja serta berlakunya hukum Pertambahan Hasil yang berkurang dan mengakibatkan kenaikan output semakin kecil, penurunan produk rata-rata serta penurunan taraf hidup. Sebaliknya, kenaikan jumlah barang-barang kapital, kemajuan teknologi, serta kenaikan kualitas dan keterampilan tenaga kerja cenderung mengimbangi berlakunya hukum Pertambahan Hasil yang berkurang.

Penyebab rendahnya pendapatan di negara-negara sedang berkembang adalah berlakunya hukum Pertambahan Hasil yang semakin berkurang akibat pertambahan penduduk sangat cepat, sementara tak ada kekuatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi berupa pertambahan kuantitas dan kualitas sumber daya alam, kapital, dan kemajuan teknologi.

Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti meningkatkan ukuran pasar domestiknya. Sebenarnya, positif atau negatifnya pertambahan penduduk bagi upaya pembangunan ekonomi sepenuhnya tergantung pada kemampuan sistem perekonomian yang bersangkutan untuk menyerap dan secara produktif memanfaatkan tambahan tenaga kerja tersebut. Adapun kemampuan itu sendiri lebih lanjut dipengaruhi oleh tingkat jenis akumulasi modal dan tersedianya input atau faktor-faktor penunjang, seperti kecakapan manajerial dan administrasi.

Tenaga kerja merupakan faktor penting dalam pertumbuhan pembangunan ekonomi suatu negara, tetapi tenaga kerja juga dapat menjadi faktor penghambat apabila tenaga kerja yang ada mendatangkan berbagai macam masalah. Ketenagakerjaan di Indonesia masih kurang optimal dalam mendorong pembangunan ekonomi meskipun program penurunan angka pengangguran terus dicanangkan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersumber dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) bahwa tingkat pengangguran di wilayah D.I. Yogyakarta kondisi Agustus 2020 adalah sebesar 4,57 persen atau sekitar 101,8 ribu orang. Angka tersebut

meningkat dibanding Agustus 2019 sebesar 3,18 persen atau sekitar 71,48 ribu orang. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah pengangguran sekitar 30 ribuan orang dalam waktu satu tahun. Kondisi ini merupakan dampak terjadinya pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak bulan Maret 2020. Tantangan besar pemerintah pusat dan daerah adalah menciptakan lapangan kerja atau usaha yang layak (*decent work*) bagi tenaga kerja yang jumlahnya banyak dan cenderung terus meningkat. Tantangan itu mencakup dua aspek sekaligus yaitu penciptaan lapangan kerja baru bagi angkatan kerja yang belum bekerja dan peningkatan produktifitas kerja bagi mereka yang sudah bekerja sehingga memperoleh imbalan kerja yang memadai untuk dapat hidup secara layak (*decent living*).

Tantangan tersebut terlalu berat apabila hanya dihadapi oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Meskipun demikian, peran yang dimainkan pemerintah dapat sangat menentukan jika dilakukan melalui pembangunan yang secara benar dan konsisten yang dirancang berbasis ketenagakerjaan, serta dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kebijakan pasar kerja diarahkan untuk mendorong terciptanya sebanyak mungkin lapangan kerja formal serta meningkatkan kesejahteraan pekerja di sektor-sektor pekerjaan informal. Pasar kerja yang fleksibel, hubungan industrial yang harmonis dengan perlindungan yang layak, keselamatan kerja yang memadai, serta terwujudnya proses penyelesaian masalah industrial yang dapat memenuhi semua pihak merupakan ciri-ciri pasar kerja yang diinginkan.

Kualitas tenaga kerja D.I. Yogyakarta juga menjadi kendala, hal ini dilatarbelakangi oleh faktor kondisi internal tenaga kerja, seperti motivasi kerja, pengalaman kerja, keahlian/keterampilan, tingkat kehadiran, inisiatif

dan kreativitas, kesehatan serta perilaku/sikap. Sedangkan untuk faktor eksternal, meliputi kedisiplinan kerja, tingkat kerja sama, perasaan aman dan nyaman dalam bekerja, teknologi yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan dan bidang pekerjaan sesuai dengan bidang yang diminati. Motivasi bekerja yang kurang atau kekurangmampuan tenaga kerja akan membuat pekerjaannya tidak membuahkan hasil yang baik dan maksimal. Keterampilan tenaga kerja pun sangat mempengaruhi kualitas kerjanya, sehingga kualitas tenaga kerja dan hasil produksinya kurang maksimal. Agar dapat bersaing dan menghasilkan nilai tambah yang tinggi diperlukan pekerja dengan produktivitas yang tinggi. Kondisi ini harus dilakukan dengan pengelolaan pelatihan dan pemberian dukungan bagi program-program pelatihan yang strategis untuk efektivitas dan efisiensi peningkatan kualitas tenaga kerja sebagai bagian integral dari investasi sumber daya manusia. Untuk itu, pekerja harus dibekali dengan pengakuan kompetensi profesi sesuai dinamika kebutuhan industri dan dinamika persaingan global.

Visi Indonesia yang maju dan mandiri tercermin dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Pembangunan sumber daya manusia diarahkan pada pencapaian sasaran secara umum yang berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selain itu tercapainya penduduk tumbuh seimbang yang diperlihatkan oleh angka reproduksi neto (NRR) sama dengan 1 atau ekuivalen dengan angka fertilitas total (TFR) 2,1 per satu orang perempuan usia reproduktif. Intinya, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dilakukan adalah berupa peningkatan daya saingnya.

Peningkatan sumber daya manusia dilakukan dengan menyelenggarakan pembangunan pendidikan sehingga memiliki daya saing dalam era global. Itu dilakukan dengan tetap berlandaskan pada norma kehidupan yang berlaku dalam masyarakat Indonesia secara luas dan tanpa diskriminasi.

Modal sumber daya manusia merupakan sumber penggerak pertumbuhan dan daya saing yang sangat diperlukan dalam pasar global, karenanya harus ada jaminan bahwa anak-anak atau generasi penerus akan mendapatkan pendidikan dasar dan menengah agar mendapatkan bekal pengetahuan dan keterampilan dasar yang memadai ketika mereka masuk ke dalam pasar tenaga kerja. Selain itu, akses terhadap pendidikan harus ditingkatkan, meningkatkan kebijakan sosial seperti beasiswa, subsidi sekolah, dan bantuan tunai bersyarat untuk memastikan anak-anak lulus SD dan SMP. Juga perlu diselenggarakan program pelatihan berbasis kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja.

Karena itu, perlu disediakan layanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau untuk semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan yang memadai. Penyediaan pelayanan pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan sosial ekonomi Indonesia di masa depan, termasuk untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui pendalaman penguasaan teknologi dan pemberian perhatian yang lebih besar pada lapangan pekerjaan yang sesuai dengan jurusan pendidikan.

Penciptaan lapangan kerja dengan memperbaiki kondisi sosial ekonomi yang kondusif, diantaranya mencakup kualitas pendidikan, kesinambungan sosial, dan lingkungan usaha yang kondusif dan berkeadilan. Penciptaan lapangan kerja di Indonesia dipengaruhi oleh kondisi ekonomi seperti nilai tukar mata uang, suku bunga perbankan, posisi kebijakan fiskal, inflasi, dan

perdagangan. D.I. Yogyakarta memiliki berbagai anugerah berlimpah sebagai sumber potensial penyumbang pertumbuhan ekonomi, yakni lahan yang subur, sumber daya alam, meningkatnya masyarakat kelas menengah, dan konsumsi dalam negeri yang kuat, kedekatan geografis dengan tujuan-tujuan utama ekspor, serta jumlah tenaga kerja yang besar.

Perluasan dan pemerataan kesempatan kerja serta peningkatan mutu dan perlindungan tenaga kerja merupakan kebijaksanaan pokok yang sifatnya menyeluruh di semua sektor. Dalam rangka perbaikan kesejahteraan pekerja/karyawan secara menyeluruh, kebijakan di bidang perlindungan tenaga kerja diarahkan kepada perbaikan upah, persyaratan kerja, kondisi kerja, dan jaminan sosial lainnya.

Beberapa permasalahan ketenagakerjaan di D.I. Yogyakarta antara lain adalah rendahnya kualitas tenaga kerja, ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dengan perluasan lapangan kerja, persebaran tenaga kerja yang tidak merata, dan pengangguran.

Kualitas tenaga kerja dapat ditentukan dengan cara melihat tingkat pendidikan. Data Sakernas Agustus 2020 menunjukkan bahwa tenaga kerja di D.I. Yogyakarta dengan tingkat pendidikan yang masih rendah yakni 29,16 persen berpendidikan SMP ke bawah, sementara itu untuk yang berpendidikan SMA sebesar 44,01 persen dan berpendidikan Perguruan Tinggi 26,83 persen. Hal ini menjadi penyebab penguasaan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) dan keterampilan kerja juga rendah, dampaknya akan berpengaruh terhadap rendahnya hasil produksi barang dan jasa, serta rendahnya upah yang diterima pekerja.

D.I. Yogyakarta yang telah memasuki era bonus demografi memiliki jumlah angkatan kerja yang melimpah, namun dalam konteks lapangan kerja

jumlahnya masih terbatas sehingga terjadi ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dan ketersediaan lapangan kerja. Hal ini berdampak meningkatnya pengangguran karena tenaga kerja yang tersedia tidak tertampung dalam lapangan kerja. Selain itu, persebaran angkatan kerja di D.I. Yogyakarta tidak merata. Data Sakernas Agustus 2020 menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja di D.I. Yogyakarta sebanyak 2,23 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sebesar 31,58 persen berada di Kabupaten Sleman; 27,38 persen di Kabupaten Bantul; 17,86 persen di Kabupaten Gunungkidul, 12,09 persen di Kabupaten Kulon Progo dan 11,09 persen di Kota Yogyakarta. Dari jumlah tersebut jumlah orang yang bekerja sebanyak 2,13 juta jiwa, dan pengangguran sebanyak 101,85 ribu jiwa. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di D.I. Yogyakarta sebesar 4,57 persen, TPT tertinggi berada di Kota Yogyakarta sebesar 9,16 persen; diikuti Kabupaten Sleman sebesar 5,09 persen; Kabupaten Bantul sebesar 4,06 persen; Kabupaten Kulon Progo sebesar 3,71 persen; dan Kabupaten Gunungkidul sebesar 2,16 persen.

Salah satu kebijakan pemerintah untuk menunjang perbaikan kesejahteraan pekerja/karyawan dilakukan dengan usaha pengumpulan berbagai informasi yang berkaitan dengan keadaan tingkat hidup pekerja/karyawan yang dikemas pada publikasi Indikator Tingkat Hidup Pekerja/Karyawan. Publikasi ini disusun sedemikian rupa sehingga merupakan cerminan dari Statistik Tingkat Hidup Pekerja/Karyawan.

1.2. Ruang Lingkup

Publikasi ini menyajikan indikator ketenagakerjaan yang meliputi:

- i. Penduduk yang bekerja
- ii. Pekerja/karyawan

- iii. Pekerja/karyawan menurut sektor/lapangan usaha
- iv. Pekerja/karyawan menurut pendidikan
- v. Rata-rata upah/gaji bersih pekerja/karyawan
- vi. Upah Minimum Kabupaten/kota dan Upah Minimum Provinsi
- vii. Pasar Tenaga Kerja

1.3. Tujuan dan Manfaat Penyusunan Publikasi

Tujuan dan Manfaat dari penyusunan publikasi ini adalah:

1. Memenuhi kebutuhan data ketenagakerjaan;
2. Menunjang perencanaan pembangunan di masa kini dan yang akan datang;
3. Memberikan informasi bagi masyarakat, pemangku kepentingan serta peminat masalah sosial dan ketenagakerjaan.

1.4. Sistematika Publikasi

Publikasi ini disajikan secara berurutan yang terdiri dari empat (4) bab. Bab I menyajikan latar belakang penyusunan publikasi tingkat hidup pekerja/karyawan, tujuan dan manfaat penyusunan publikasi, serta sistematika publikasi. Bab II membahas tentang metodologi yang mencakup sumber data, konsep dan definisi. Bab III menyajikan hasil perhitungan dan analisis hasil tentang penduduk yang bekerja, pekerja/karyawan, pekerja/karyawan menurut sektor/lapangan usaha, pekerja/karyawan menurut pendidikan, rata-rata upah/gaji pekerja/karyawan, upah minimum kabupaten/kota dan upah minimum provinsi, serta pasar tenaga kerja. Terakhir Bab IV merupakan penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran.

METODOLOGI

2.1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam publikasi ini berasal dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS). Sakernas dirancang khusus untuk mengumpulkan data yang dapat menggambarkan keadaan umum ketenagakerjaan antar periode pencacahan. Dilihat dari perkembangannya, Sakernas telah mengalami beberapa perubahan sejak pertama kali dilaksanakan tahun 1976, baik cakupan sampel, wilayah dan rumah tangga maupun periode pencacahan. Sakernas pada tahun 1986 sampai dengan 1993 dilaksanakan secara triwulanan, yaitu Triwulan I (Februari), Triwulan II (Mei), Triwulan III (Agustus) dan Triwulan IV (November). Pada tahun 1994 sampai dengan 1999, Sakernas dilaksanakan secara tahunan setiap bulan Agustus, sedangkan tahun 2000 sampai dengan 2001 secara semesteran (Februari dan Agustus), kemudian tahun 2002 sampai dengan 2004 selain secara semesteran juga dilaksanakan secara triwulanan. Mulai tahun 2005 hingga 2010, Sakernas dilakukan secara semesteran, Semester I (Februari) dan Semester II (Agustus).

Dengan semakin mendesaknya tuntutan data ketenagakerjaan, baik variasi, kontinuitas, kemutakhiran, dan peningkatan akurasi data yang dihasilkan, maka pengumpulan data Sakernas mulai tahun 2011 hingga tahun 2014 dilakukan kembali secara triwulanan yaitu bulan Februari, Mei, Agustus dan November untuk mendapatkan angka estimasi provinsi dan pada bulan Agustus dilakukan penambahan sampel untuk angka estimasi kabupaten/kota. Unit pencacahannya adalah rumah tangga dan mencakup seluruh wilayah Indonesia. Pada November 2014 karena adanya berbagai alasan Sakernas tidak dilaksanakan dan mulai tahun

2015 sampai tahun 2020 Sakernas kembali dilaksanakan semesteran (dua kali setahun) yaitu Februari dan Agustus. Secara rinci perjalanan pelaksanaan Sakernas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.1. Sejarah Sakernas 1976 – 2020

Periode	Waktu Pelaksanaan	Level Estimasi	Cakupan
(1)	(2)	(3)	(4)
1976 – 1985	Tidak Setiap Tahun	Provinsi	Indonesia*
1986 – 1989	Triwulanan	Provinsi	Indonesia*
1990 – 1993	Triwulanan	Provinsi	Indonesia*
1994 – 1999	Tahunan	Provinsi	Indonesia*
2000	Semesteran	Pulau	Indonesia**
2001	Semesteran	Pulau	Indonesia
2002 – 2004	Triwulanan	Provinsi	Indonesia
2005 – Februari 2007	Semesteran	Provinsi	Indonesia
Agustus 2007 – 2010	Semesteran	Kabupaten/kota	Indonesia
2011 – 2014	Triwulanan	Kabupaten/kota	Indonesia
2015	Semesteran	Kabupaten/kota	Indonesia
2016	Semesteran	Provinsi	Indonesia
2017-2020	Semesteran	Kabupaten/kota	Indonesia

Keterangan:

*) Tahun 1976 – 1978 tanpa Timor Timur,

***) Tahun 2000 tanpa Maluku

Selain data Sakernas, sumber data yang digunakan pada publikasi ini adalah publikasi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka dan data sekunder yang bersumber dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Gambar 2.1. Diagram Ketenagakerjaan Berdasarkan *International Conference of Labour Statistician (ICLS) ke-13*



2.2. Konsep Dan Definisi

Teori ketenagakerjaan yang digunakan dalam Sakernas Agustus 2020s menggunakan Konsep Baku Angkatan Kerja (*Standard Labour Force Concept*) yang tertuang dalam *International Conference of Labour Statisticians (ICLS) 13* tahun 1982.

1. **Penduduk** adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia atau wilayah observasi selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap.
2. **Penduduk usia kerja** adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas.
3. **Angkatan kerja** adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
4. **Bukan angkatan kerja** adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.
5. **Bekerja** adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit selama satu jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Termasuk orang yang sementara tidak bekerja yaitu mereka yang mempunyai pekerjaan/usaha tetapi selama seminggu yang lalu tidak bekerja karena sesuatu sebab seperti sakit, cuti, menunggu panen, tugas belajar atau mogok kerja. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.
6. **Pengangguran** adalah meliputi penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (putus asa), atau sudah diterima tetapi belum mulai bekerja atau sudah mempunyai usaha tapi belum memulai.

7. **Lapangan usaha** adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja. Lapangan pekerjaan pada publikasi ini didasarkan pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2015.
8. **Status pekerjaan** adalah jenis kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Mulai tahun 2001 status pekerjaan dibedakan menjadi 7 (tujuh) kategori yaitu:
- a. **Berusaha sendiri** adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis, yaitu dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar, termasuk yang sifat pekerjaannya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.
 - b. **Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar** adalah bekerja atau berusaha atas resiko sendiri, dan menggunakan buruh/pekerja tak dibayar dan atau buruh/pekerja tidak tetap.
 - c. **Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar** adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh/pekerja tetap yang dibayar.
 - d. **Buruh/Karyawan/Pegawai** adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang. Buruh yang tidak mempunyai majikan tetap, tidak digolongkan sebagai buruh/karyawan, tetapi sebagai pekerja bebas. Seseorang dianggap memiliki majikan tetap jika memiliki 1 (satu) majikan (orang/rumah tangga) yang sama dalam sebulan

terakhir, khusus pada sektor bangunan batasannya tiga bulan. Apabila majikannya instansi/ lembaga, boleh lebih dari satu.

- e. **Pekerja bebas di pertanian**, adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir) di usaha pertanian baik berupa usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Usaha pertanian meliputi: pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan perburuan, termasuk juga jasa pertanian.
- f. **Pekerja bebas di non pertanian** adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir), di usaha non pertanian dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Usaha non pertanian meliputi: usaha di sektor pertambangan, industri, listrik, gas dan air, sektor konstruksi/bangunan, sektor perdagangan, sektor angkutan, pergudangan dan komunikasi, sektor keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan, sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan. Huruf e dan f yang dikembangkan mulai pada publikasi 2001, pada tahun 2000 dan sebelumnya dikategorikan pada huruf d dan a (huruf e termasuk dalam d dan huruf f termasuk dalam a).

g. **Pekerja keluarga/tak dibayar** adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dengan tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang maupun barang. Pekerja tak dibayar tersebut dapat terdiri dari:

- ✓ Anggota rumah tangga dari orang yang dibantunya, seperti istri/anak yang membantu suaminya/ayahnya bekerja di sawah dan tidak dibayar.
- ✓ Bukan anggota rumah tangga tetapi keluarga dari orang yang dibantunya, seperti famili yang membantu melayani penjualan di warung dan tidak dibayar.

9. **Jenis pekerjaan/jabatan** adalah macam pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau ditugaskan kepada seseorang yang sedang bekerja atau yang sementara tidak bekerja. Jenis pekerjaan pada publikasi ini, didasarkan atas Klasifikasi Baku Jenis Pekerjaan Indonesia (KBJI) 2014 yang mengacu kepada ISCO 2008.

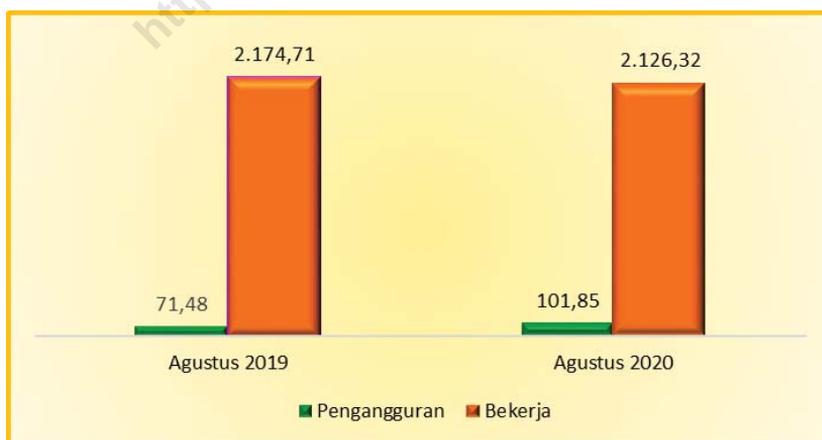
10. **Upah/gaji bersih** adalah upah/gaji bersih yang biasanya diterima selama sebulan oleh buruh/karyawan/pegawai baik berupa uang atau barang yang dibayarkan oleh perusahaan/kantor/majikan. Upah/gaji bersih yang dimaksud adalah setelah dikurangi dengan potongan-potongan, iuran wajib, pajak penghasilan dan lain sebagainya oleh perusahaan/kantor/ majikan.

11. **Pendidikan tertinggi yang ditamatkan** adalah tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu tingkatan sekolah formal dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah.

3.1. Tenaga Kerja

Berdasarkan konsep dasar ketenagakerjaan, penduduk dikelompokkan menjadi penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Menurut BPS, penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Berdasarkan kegiatan aktivitasnya, penduduk usia kerja dikategorikan menjadi dua kelompok yaitu penduduk yang aktif secara ekonomi dan penduduk yang tidak aktif secara ekonomi. Penduduk yang aktif secara ekonomi disebut dengan Angkatan Kerja (AK) dan penduduk yang tidak aktif secara ekonomi disebut sebagai Bukan Angkatan Kerja (BAK). Selanjutnya Angkatan Kerja terdiri dari penduduk usia kerja yang memiliki pekerjaan, termasuk yang sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Gambar 3.1. Jumlah Angkatan Kerja D.I. Yogyakarta, Agustus 2019 dan Agustus 2020 (ribu orang)



Sumber: Sakernas Agustus 2019 dan 2020

Keterangan: Agustus 2019 angka revisi

Penduduk yang termasuk kategori pengangguran adalah penduduk yang sedang mencari pekerjaan; mempersiapkan suatu usaha baru; yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa); atau sudah diterima bekerja, tetapi belum mulai bekerja. Sementara itu yang dimaksud bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas berdasarkan data Sakernas Agustus 2020 mencapai 3,13 juta orang. Jumlah tersebut naik sebanyak 43,93 ribu orang atau setara dengan 1,42 persen apabila dibandingkan dengan keadaan Agustus 2019 (3,09 juta orang). Sementara itu pada periode yang sama, jumlah angkatan kerja di D.I. Yogyakarta mencapai 2,23 juta orang atau menurun 18,03 ribu orang (0,80 persen) dibandingkan Agustus 2019. Penurunan angkatan kerja ini disebabkan karena menurunnya jumlah penduduk yang bekerja. Jumlah penduduk bekerja pada Agustus 2019 di D.I. Yogyakarta sebanyak 2,17 juta jiwa menurun menjadi 2,13 juta jiwa pada Agustus 2020. Sementara itu jumlah pengangguran di D.I. Yogyakarta meningkat 30,36 ribu orang atau setara dengan 42,48 persen dibanding tahun 2019. Peningkatan jumlah pengangguran ini merupakan dampak pandemi Covid-19 yang mulai terjadi sejak awal Maret 2020 dan menyebabkan banyak pekerja yang dirumahkan, terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), pengurangan jam kerja dan pengurangan pendapatan.

Peningkatan jumlah penduduk usia kerja yang tidak diimbangi dengan peningkatan penduduk bekerja mengakibatkan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) menurun. Pada Agustus 2020, TPAK di D.I. Yogyakarta sebesar 71,12 persen atau menurun 1,60 persen poin dibandingkan Agustus 2019

yang mencapai 72,72 persen. Dilihat menurut jenis kelamin, TPAK laki-laki di D.I. Yogyakarta jauh lebih tinggi dibandingkan dengan TPAK perempuan. Gambaran ini terlihat pada keadaan Agustus 2019 maupun Agustus 2020. TPAK laki-laki pada Agustus 2020 mencapai 78,20 persen, sementara TPAK perempuan hanya mencapai 64,33 persen. Hal tersebut dapat diartikan bahwa terdapat 78 orang dari 100 orang penduduk usia kerja laki-laki termasuk dalam kategori angkatan kerja. Sementara dari 100 orang penduduk usia kerja perempuan yang termasuk kategori angkatan kerja hanya sekitar 64 orang. Rendahnya TPAK perempuan dikarenakan jumlah penduduk usia kerja perempuan yang mengurus rumah tangga lebih banyak dibandingkan laki-laki dan sebaliknya jumlah penduduk perempuan yang bekerja lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Sedangkan apabila dilihat menurut tipe daerah, menunjukkan bahwa TPAK perdesaan lebih tinggi dibandingkan TPAK perkotaan. TPAK perdesaan pada Agustus 2020 mencapai 71,39 persen, sementara TPAK perkotaan hanya mencapai 71,03 persen. Hal tersebut dikarenakan penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk bukan angkatan kerja di perkotaan lebih banyak dibandingkan di perdesaan. Tersedianya lembaga pendidikan yang cukup memadai menyebabkan sebagian besar bukan angkatan kerja di perkotaan masih bersekolah, sedangkan penduduk di perdesaan yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya lebih memilih bekerja.

Indikator penting lainnya dalam ketenagakerjaan adalah rasio penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk usia kerja atau dikenal dengan *Employment to Population Ratio* (EPR). Pada Agustus 2020 angka EPR di D.I. Yogyakarta sebesar 67,87. Berdasarkan angka tersebut dapat diinterpretasikan bahwa dari 1.000 orang penduduk umur 15 tahun ke atas

pada Agustus 2020 di D.I. Yogyakarta terdapat sekitar 679 orang yang bekerja. EPR ini mengalami penurunan dibandingkan dengan keadaan Agustus 2019 yang mencapai 70,41 atau turun 2,53 poin. Jika dilihat menurut jenis kelamin EPR laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan EPR perempuan. Pada Agustus 2020 EPR laki-laki sebesar 74,00 dan EPR perempuan sebesar 61,99. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga kerja laki-laki lebih mudah terserap di lapangan kerja dibanding pekerja perempuan.

Sementara itu berdasarkan tipe daerah, EPR perdesaan lebih tinggi dibandingkan EPR perkotaan. EPR di wilayah perdesaan mencapai 69,84 dan wilayah perkotaan sebesar 67,18. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk daerah perdesaan tidak terlalu selektif dalam memilih pekerjaan sehingga lebih terserap dalam pekerjaan dibanding penduduk daerah perkotaan. Penduduk perdesaan tidak terlalu memperhatikan tingkat kelayakan upah.

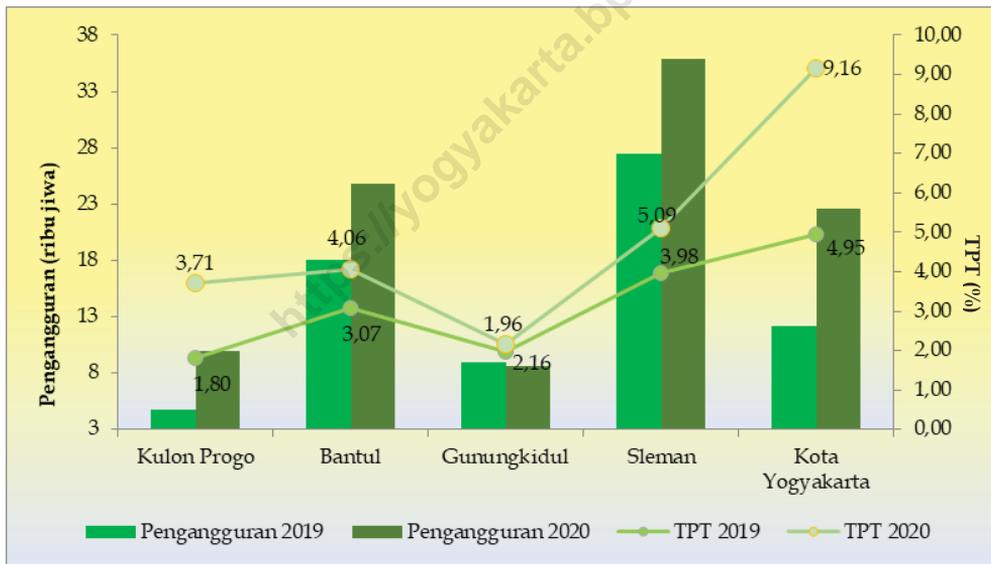
Gambar 3.2. Distribusi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota di D.I Yogyakarta, Agustus 2020 (persen)



Sumber: Sakernas Agustus 2020

Distribusi penyebaran penduduk yang bekerja di D.I. Yogyakarta tidak merata. Sebagian besar penduduk bekerja berada di Kabupaten Sleman yang mencapai 31,41 persen, diikuti Kabupaten Bantul (27,52 persen) dan paling kecil berada di Kota Yogyakarta (10,56 persen) seperti ditunjukkan pada Gambar 3.2. Rendahnya distribusi tenaga kerja di Kota Yogyakarta sebagai ibu kota D.I Yogyakarta mengindikasikan banyaknya infrastruktur pendidikan dibandingkan empat kabupaten lainnya sehingga penduduk usia 15 tahun ke atas lebih didominasi sebagai pelajar atau mahasiswa dibandingkan sebagai pekerja.

Gambar 3.3. Jumlah Pengangguran dan TPT D.I. Yogyakarta Menurut Kabupaten/Kota, Agustus 2019 dan Agustus 2020



Sumber: Sakernas Agustus 2019 dan 2020

Keterangan: Agustus 2019 angka revisi

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2020 bahwa jumlah pengangguran di D.I. Yogyakarta sebanyak 101,85 ribu orang atau meningkat 30,36 ribu orang dibanding Agustus 2019 yang mencapai 71,48 ribu orang. Hal ini mengakibatkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) meningkat sebesar

1,39 persen poin, yaitu dari 3,18 persen (Agustus 2019) menjadi 4,57 persen (Agustus 2020). TPT sebesar 4,57 persen mengandung arti bahwa dari 100 orang Angkatan kerja di D.I. Yogyakarta terdapat sekitar 4 sampai 5 orang yang termasuk penganggur.

Apabila dilihat menurut kabupaten/kota, terlihat bahwa TPT Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta di atas TPT D.I Yogyakarta, sedangkan TPT Kabupaten Kulon Progo, Bantul dan Gunungkidul di bawah TPT D.I Yogyakarta. TPT tertinggi pada Agustus 2020 mencapai 9,16 persen berada di Kota Yogyakarta dan TPT terendah sebesar 2,16 persen ada di Kabupaten Gunungkidul. Pada Agustus 2020, TPT di semua kabupaten/kota se-D.I. Yogyakarta menunjukkan peningkatan. Hal ini sebagai dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak tenaga kerja dirumahkan atau di PHK sehingga meningkatkan pengangguran. Dampak Covid-19 terhadap peningkatan TPT pada Agustus 2020 terbanyak di Kota Yogyakarta, diikuti Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Sleman. TPT Kota Yogyakarta pada Agustus 2020 mengalami peningkatan sebesar 4,21 persen poin, diikuti Kulon Progo meningkat 1,91 persen poin dan Kabupaten Sleman meningkat 1,11 persen poin.

3.2. Pekerja/Karyawan

Pasal 1 Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Selanjutnya Pasal 1 angka (3) dari undang–undang tersebut menyebutkan bahwa, pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dari pernyataan ini

selanjutnya dirumuskan bahwa pekerja/karyawan/buruh adalah tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja dibawah perintah pengusaha/pemberi kerja dengan mendapatkan upah atau imbalan dalam bentuk lain (Maimun,2003).

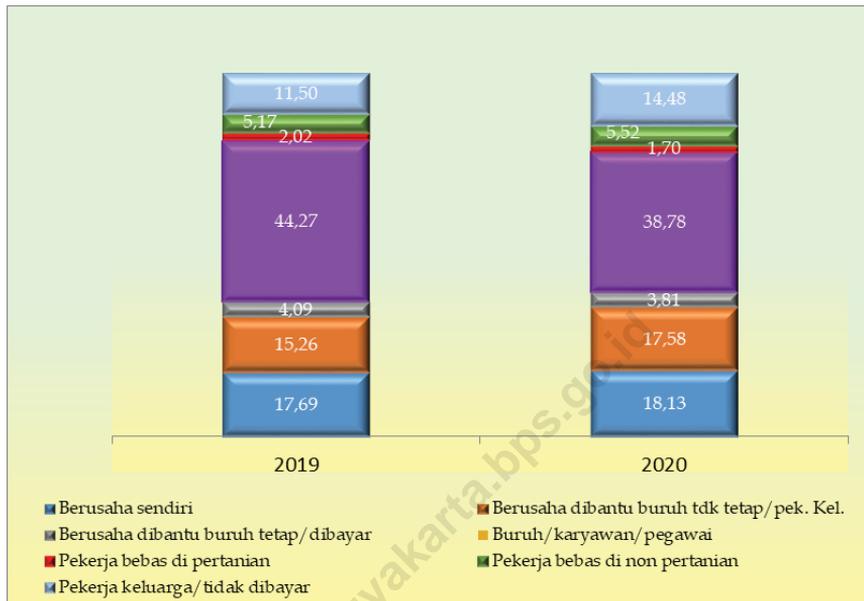
Kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit pekerjaan disebut status pekerjaan. Status pekerjaan utama yang dikumpulkan dalam Sakernas dibedakan menjadi 7 yaitu berusaha sendiri, berusaha dengan bantuan buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar, berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar, buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non pertanian dan pekerja keluarga/tidak dibayar. Status pekerjaan inilah yang membedakan karyawan satu dengan lainnya. Status pekerjaan mempengaruhi upah dan kepuasan kerja pekerja/karyawan.

Status pekerjaan juga merupakan bagian yang dapat mempengaruhi kinerja pekerja/karyawan dan secara tidak langsung akan mempengaruhi motivasi karena pekerja/karyawan membutuhkan kejelasan apakah pekerja/karyawan tersebut merupakan pegawai tetap atau pegawai tidak tetap. Karyawan tetap memiliki keuntungan lebih dibanding karyawan tidak tetap atau kontrak. Jika terjadi pemutusan hubungan kerja, karyawan tetap akan mendapatkan pesangon dan pengganti hak-hak jika ada, sedangkan karyawan tidak tetap jika mengundurkan diri harus membayar uang penalti yang biasanya berupa biaya sejumlah gaji selama periode tertentu. Disamping itu pekerja/karyawan tetap memiliki beberapa hak yang tidak dimiliki pekerja/karyawan tidak tetap seperti mendapatkan upah lembur jika bekerja melebihi jam kerja yang ditentukan; jaminan Sosial dan K3 (Keselamatan serta Kesehatan Kerja); menerima upah yang layak; pembatasan waktu kerja,

istirahat, cuti dan libur; karyawan perempuan memiliki hak perlindungan selama masa kehamilan; cuti keguguran; hak menyusui; dan memiliki hak cuti hamil dan cuti melahirkan; hak perlindungan selama masa kehamilan. Oleh karena itu demi keamanan finansial, kepastian karier dan status, umumnya pekerja/karyawan lebih suka memilih untuk menjadi pekerja/karyawan tetap dibanding pekerja/karyawan tidak tetap. Jadi kedudukan karyawan tetap dinilai lebih tinggi dibandingkan karyawan tidak tetap.

Seperti disebutkan sebelumnya, pekerja/karyawan merupakan tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja dibawah perintah pengusaha/pemberi kerja dengan mendapatkan upah/gaji atau imbalan dalam bentuk lain. Oleh karena itu pekerja/karyawan disebut juga pekerja penerima upah. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa pekerja/karyawan penerima upah pada publikasi ini meliputi penduduk yang bekerja dengan status pekerja/karyawan/buruh tetap, pekerja bebas pertanian, dan pekerja bebas non pertanian. Pekerja keluarga/tidak dibayar tidak termasuk sebagai pekerja/karyawan karena tidak menerima upah. Sedangkan penduduk bekerja dengan status berusaha mencakup status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar, dan berusaha dibantu buruh tetap/pekerja dibayar. Dari data status pekerjaan dapat diperoleh informasi keadaan dinamika pasar kerja dan tingkat pembangunan suatu daerah. Dimana kemajuan pembangunan ketenagakerjaan mengharapkan terjadinya peningkatan jumlah pekerja digaji/dibayar (buruh/karyawan/pegawai) dan penurunan jumlah pekerja keluarga/tidak dibayar.

Gambar 3.4. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di D.I. Yogyakarta, Agustus 2019 dan Agustus 2020 (persen)



Sumber: Sakernas Agustus 2019 dan 2020

Keterangan: Agustus 2019 angka revisi

Berdasarkan Sakernas Agustus 2020 menunjukkan bahwa persentase penduduk bekerja menurut status pekerjaan utama distribusinya tidak begitu berbeda dibanding dengan keadaan Agustus 2019. Mayoritas penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja di D.I. Yogyakarta berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai dan paling sedikit berstatus pekerja bebas pertanian. Persentase penduduk yang berstatus buruh/karyawan/pegawai pada Agustus 2020 mencapai 38,78 persen dan jika dibandingkan dengan Agustus 2019 turun 5,49 persen poin. Sementara itu penduduk bekerja yang berstatus pekerja bebas pertanian hanya mencapai 1,70 persen atau turun sebesar 0,32 persen poin dibandingkan Agustus 2019.

Apabila status pekerjaan dikelompokkan menjadi 3 status, yaitu berusaha, pekerja/karyawan penerima upah dan pekerja keluarga/tidak dibayar maka jumlah pekerja/karyawan penerima upah menempati jumlah terbanyak. Persentase penduduk bekerja/karyawan penerima upah di D.I. Yogyakarta pada Agustus 2020 mencapai 46,00 persen. Pekerja/karyawan penerima upah tersebut terdiri dari penduduk berstatus buruh/karyawan/pegawai sebanyak 38,78 persen dan berstatus pekerja bebas sebanyak 7,22 persen. Dibandingkan kondisi Agustus 2019, persentase penduduk bekerja/karyawan penerima upah pada Agustus 2020 turun sebesar 5,46 persen poin. Penurunan utamanya terjadi pada penduduk bekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai (turun 5,49 persen poin), sedangkan yang berstatus pekerja bebas justru meningkat sebesar 0,03 persen poin. Peningkatan persentase pekerja bebas disebabkan karena kenaikan pekerja bebas non pertanian pada Agustus 2020, yaitu naik 0,35 persen poin dibandingkan Agustus 2019. Sedangkan pekerja bebas pertanian justru turun sebesar 0,32 persen poin.

Selanjutnya persentase penduduk bekerja dengan status berusaha pada Agustus 2020 mencapai 39,52 persen. Penduduk yang berusaha tersebut terdiri dari status berusaha sendiri sebanyak 18,13 persen, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar sebanyak 17,58 persen, dan berusaha dibantu buruh tetap/pekerja dibayar sebanyak 3,81 persen. Dibandingkan Agustus 2019, penduduk yang berusaha di D.I. Yogyakarta pada Agustus 2020 bertambah sebesar 2,48 persen poin. Penambahan penduduk yang berusaha terjadi pada penduduk yang berstatus berusaha sendiri (0,44 persen poin) maupun berusaha dibantu buruh tidak tetap (0,32 persen poin). Sementara itu status berusaha dibantu buruh tetap mengalami penurunan

sebesar 0,28 persen poin. Seperti halnya penduduk yang berstatus berusaha, penduduk bekerja dengan status pekerja keluarga/tidak dibayar pada Agustus 2020 juga mengalami peningkatan. Persentase pekerja keluarga/tidak dibayar pada Agustus 2020 sebanyak 14,48 persen atau meningkat 2,98 persen poin dibandingkan Agustus 2019.

Persentase penduduk dengan status berusaha dibantu buruh tetap/pekerja dibayar, buruh/karyawan/pegawai dan pekerja bebas pertanian mengalami penurunan. Sebaliknya persentase penduduk dengan status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar, pekerja bebas non pertanian dan pekerja keluarga/tidak dibayar justru meningkat. Fenomena tersebut menggambarkan terpuruknya kondisi ketenagakerjaan di D.I. Yogyakarta akibat dampak Covid-19. Sejumlah usaha mengalami penurunan produksi bahkan berhenti berproduksi sehingga pekerja/karyawan penerima upah mengalami penurunan pendapatan atau mungkin justru kehilangan pekerjaan. Banyak buruh/karyawan/pegawai yang dirumahkan, PHK, maupun pengurangan jam kerja. Agar kebutuhan keluarga tetap dapat terpenuhi, memaksa sebagian dari mereka memilih tetap bekerja tetapi dengan beralih ke status berusaha maupun menjadi pekerja bebas non pertanian. Sedangkan sebagian lagi memilih tetap pekerja dengan cara membantu anggota rumah tangga lainnya yang bekerja walaupun tanpa mendapatkan upah/gaji (pekerja keluarga/tidak dibayar), mengurus rumah tangga dan bahkan menjadi pengangguran. Hal ini digambarkan dengan persentase penduduk berstatus berusaha pada Agustus 2020 meningkat sebesar 2,48 persen poin, pekerja bebas non pertanian meningkat 0,35 persen poin dan pekerja keluarga/tidak dibayar meningkat 2,98 persen poin dibandingkan Agustus 2019.

Tabel 3.1. Persentase Penduduk Usia 15 ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di D.I. Yogyakarta, Agustus 2019 dan Agustus 2020 (persen)

Status Pekerjaan	Agustus 2019			Agustus 2020		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	17,17	18,32	17,69	19,01	17,12	18,13
2	15,95	14,42	15,26	18,28	16,78	17,58
3	5,18	2,74	4,09	4,75	2,73	3,81
4	46,92	41,01	44,27	41,01	36,24	38,78
5	2,10	1,91	2,02	1,82	1,57	1,70
6	7,65	2,13	5,17	8,96	1,57	5,52
7	5,03	19,47	11,50	6,17	23,99	14,48
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Sakernas Agustus 2019 dan 2020

Keterangan: Agustus 2019 angka revisi

1 = Berusaha sendiri;

2 = Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar;

3 = Berusaha dibantu buruh tetap/pekerja dibayar;

4 = Buruh/karyawan/pegawai;

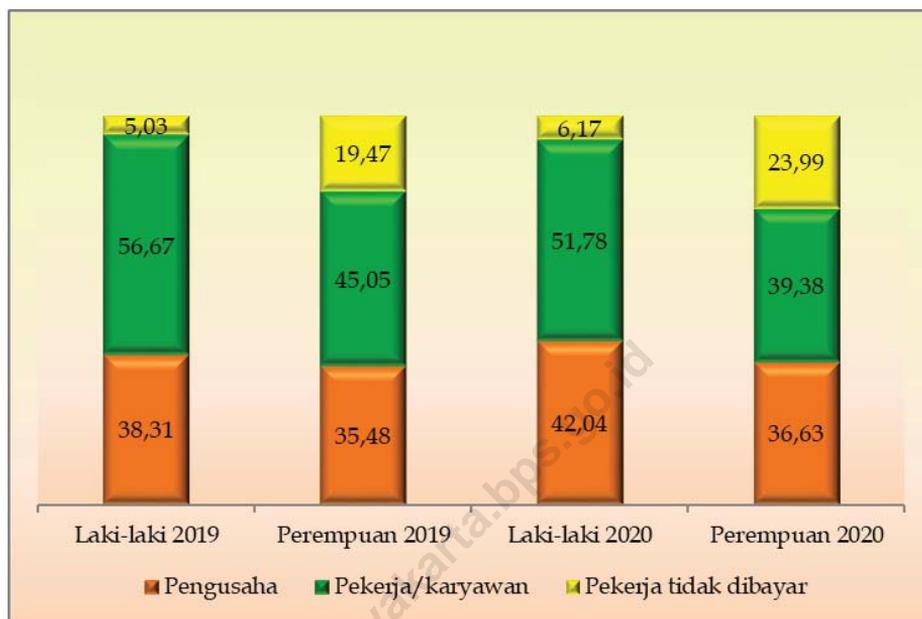
5 = Pekerja bebas pertanian;

6 = Pekerja bebas non pertanian;

7 = Pekerja keluarga/tidak dibayar

Pola serupa juga terjadi pada penduduk yang bekerja menurut jenis kelamin. Sebagian besar status pekerjaan utama didominasi oleh laki-laki, kecuali pekerja keluarga/tidak dibayar didominasi perempuan. Penduduk laki-laki yang berstatus berusaha mencapai 42,04 persen, sedangkan perempuan sebanyak 36,63 persen. Demikian pula pekerja/karyawan laki-laki penerima upah sebanyak 51,79 persen dan perempuan hanya mencapai 39,38 persen. Jika dibandingkan kondisi Agustus 2019, penurunan persentase pekerja/karyawan penerima upah laki-laki lebih lambat dibandingkan perempuan yaitu sebesar 4,88 persen poin bagi laki-laki dibanding 5,67 persen poin bagi perempuan.

Gambar 3.5. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di D.I. Yogyakarta, Agustus 2019 dan Agustus 2020 (persen)



Sumber: Sakernas Agustus 2019 dan 2020

Keterangan: Agustus 2019 angka revisi

Berbeda dengan penduduk yang berstatus berusaha dan pekerja/karyawan penerima upah, perempuan yang berstatus pekerja keluarga/tidak dibayar lebih banyak dibandingkan laki-laki. Perempuan sebagai pekerja keluarga/tidak dibayar mencapai 23,99 persen, sedangkan laki-laki hanya mencapai 6,17 persen. Persentase perempuan sebagai pekerja keluarga/tidak dibayar hampir 4 kali lipat dibanding pekerja keluarga/tidak dibayar laki-laki. Kenyataan ini dapat dipahami karena perempuan yang bekerja, disamping mencari nafkah mereka mempunyai tugas pokok domestik di rumah tangga dan kegiatan publik di masyarakat. Dengan demikian perempuan tidak bisa sepenuhnya mencurahkan waktu dan perhatiannya untuk kerja mencari nafkah, apalagi lokasi pekerjaan yang jauh dari keluarga.

Pada masa pandemi Covid-19, Agustus 2020, pekerja keluarga/tidak dibayar perempuan mengalami peningkatan sebesar 4,53 persen poin dibandingkan Agustus 2019. Sedangkan pekerja keluarga/tidak dibayar laki-laki hanya mengalami peningkatan sebesar 1,15 persen poin.

Berdasarkan Sakernas Agustus 2020 tercatat bahwa dari 2,13 juta penduduk usia kerja yang bekerja, 73,02 persen diantaranya tinggal di perkotaan dan 26,98 persen tinggal di perdesaan. Jika diamati menurut daerah tempat tinggal, penduduk yang bekerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar, pekerja bebas dan pekerja keluarga/tidak dibayar lebih banyak berada di perdesaan, sedangkan yang berstatus berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tetap/pekerja dibayar dan buruh/karyawan/pegawai pekerja/buruh tetap lebih banyak berada di perkotaan. Hal ini selaras dengan kondisi perdesaan yang masih tersedia lahan kosong sehingga pengusaha lebih leluasa dalam melakukan aktifitas kerja atau memperluas ruang usaha. Demikian juga di perdesaan sumber daya alam maupun manusia lebih banyak tersedia dan murah, dampaknya akan mengurangi biaya produksi dan lebih menguntungkan. Pekerja keluarga/tidak dibayar umumnya merupakan orang-orang sederhana, dan tidak menuntut balas jasa. Mereka ini kebanyakan tinggal di perdesaan. Sementara itu buruh/karyawan/pegawai kebanyakan tinggal di perkotaan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan agar status pekerjaannya semakin meningkat, dan dapat mengikuti perkembangan jaman.

Buruh/karyawan/pegawai pada Agustus 2020 di perkotaan mendominasi dari status pekerjaan lainnya. Tabel 3.2 menunjukkan bahwa pada Agustus 2020 sebanyak 44,19 persen dari total penduduk yang bekerja di perkotaan berstatus buruh/karyawan/pegawai. Sedangkan buruh/

karyawan/pegawai di perdesaan hanya mencapai 24,13 persen. Terbanyak berikutnya di perkotaan berstatus berusaha sendiri, yaitu mencapai 19,60 persen dan diikuti berstatus berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar sebesar 14,27 persen.

Tabel 3.2. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Tipe Daerah di D.I. Yogyakarta, Agustus 2019 dan Agustus 2020 (persen)

Status Pekerjaan	Agustus 2019			Agustus 2020		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	18,55	15,57	17,69	19,60	14,15	18,13
2	12,38	22,31	15,26	14,27	26,52	17,58
3	4,71	2,58	4,09	4,44	2,11	3,81
4	49,90	30,51	44,27	44,19	24,13	38,78
5	1,43	3,45	2,02	1,23	3,00	1,70
6	4,58	6,62	5,17	4,90	7,20	5,52
7	8,45	18,96	11,50	11,37	22,89	14,48
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Sakernas Agustus 2019 dan 2020

Keterangan: Agustus 2019 angka revisi

1 = Berusaha sendiri;

2 = Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar;

3 = Berusaha dibantu buruh tetap/pekerja dibayar;

4 = Buruh/karyawan/pegawai;

5 = Pekerja bebas pertanian;

6 = Pekerja bebas non pertanian;

7 = Pekerja keluarga/tidak dibayar

Berdasarkan Gambar 3.6 terlihat bahwa pekerja/karyawan penerima upah pada Agustus 2019 cukup mendominasi, baik di perkotaan maupun perdesaan. Akan tetapi pada Agustus 2020, pekerja/karyawan penerima upah dominan di perkotaan dan di perdesaan menempati peringkat kedua setelah

pekerja keluarga/tidak dibayar. Pekerja/karyawan penerima upah pada Agustus 2020 di perkotaan mencapai 50,32 persen. Dari sejumlah tersebut 44,19 persen diantaranya berstatus sebagai pekerja/karyawan/pegawai, 1,23 persen pekerja bebas pertanian dan 4,90 persen pekerja bebas non pertanian. Sementara itu pekerja/karyawan penerima upah yang tinggal di perdesaan ada sebanyak 34,32 persen, dengan rincian 24,13 persen sebagai buruh/karyawan/pegawai, 3,00 persen pekerja bebas pertanian dan 7,20 persen pekerja bebas non pertanian.

Gambar 3.6. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Tipe Daerah di D.I. Yogyakarta, Agustus 2019 dan Agustus 2020 (persen)



Sumber: Sakernas Agustus 2019 dan 2020

Keterangan: Agustus 2019 angka revisi

Jika dibandingkan kondisi setahun yang lalu (Agustus 2019), persentase pekerja/karyawan penerima upah pada Agustus 2020 mengalami penurunan 5,46 persen poin. Penurunan persentase pekerja/karyawan penerima upah juga terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan. Penurunan buruh/

karyawan/pegawai di perkotaan (5,71 persen poin) lebih lambat dibandingkan dengan perdesaan (6,38 persen poin). Demikian pula pekerja bebas pertanian di perkotaan maupun perdesaan mengalami penurunan, yaitu masing-masing turun sebesar 0,20 persen poin di perkotaan dan 0,45 persen poin di perdesaan. Sedangkan pekerja bebas non pertanian di perkotaan maupun perdesaan pada Agustus 2020 meningkat dibandingkan Agustus 2019, yaitu masing-masing naik 0,32 persen poin di perkotaan dan 0,58 persen poin di perdesaan.

Penduduk bekerja dengan status berusaha pada Agustus 2020 sebanyak 39,52 persen atau meningkat 2,48 persen poin apabila dibandingkan tahun 2019. Jika dilihat menurut tipe daerah, secara kuantitatif penduduk dengan status berusaha lebih banyak di perkotaan dibandingkan di perdesaan (Gambar 3.6). Penduduk yang bekerja dengan status berusaha di perkotaan mencapai 38,31 persen atau meningkat 2,67 persen poin, sedangkan di perdesaan mencapai 42,78 persen atau turun 2,32 persen poin jika dibandingkan Agustus 2019.

Selanjutnya secara umum persentase pekerja keluarga/tidak dibayar pada Agustus 2020 mengalami peningkatan sebesar 2,98 persen poin. Hal ini terutama disebabkan dengan meningkatnya persentase pekerja keluarga/tidak dibayar di perdesaan pada Agustus 2020 sebesar 3,93 persen poin dibandingkan Agustus 2019, sedangkan pekerja keluarga/tidak dibayar di perkotaan naik 2,92 persen poin. Dari keterangan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar buruh/karyawan/pegawai D.I. Yogyakarta tinggal di perkotaan, sedangkan pekerja bebas dan pekerja keluarga/tidak dibayar lebih banyak tinggal di perdesaan.

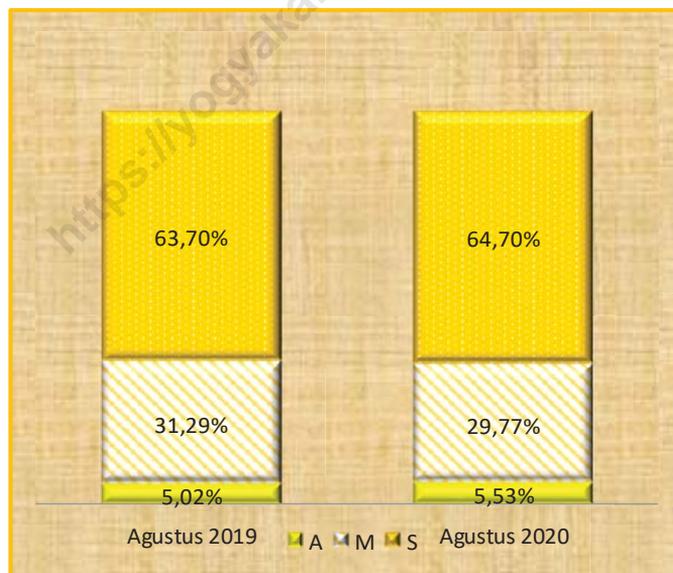
3.3. Pekerja/Karyawan Menurut Sektor/Lapangan Usaha

Lapangan usaha/pekerjaan merupakan bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja, atau yang dihasilkan oleh perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja. Klasifikasi lapangan usaha disajikan dalam 17 kategori mengacu pada Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2015 yang berdasarkan *International Standard Industrial Classification* (ISIC) revisi 4. Tujuh belas (17) kategori yang dimaksud adalah:

- A. Pertanian, kehutanan, dan perikanan;
- B. Pertambangan dan penggalian;
- C. Industri pengolahan;
- D. Pengadaan listrik dan gas;
- E. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang;
- F. Konstruksi;
- G. Perdagangan besar dan eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor;
- H. Transportasi dan pergudangan;
- I. Penyediaan akomodasi dan makan minum;
- J. Informasi dan komunikasi;
- K. Jasa keuangan dan asuransi;
- L. Real estat;
- M,N. Jasa perusahaan;
- O. Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib;
- P. Jasa pendidikan;
- Q. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial;
- R,S,T,U. Jasa lainnya.

Dalam penyederhanaan hasil dan pembahasan, sektor/lapangan usaha dibagi menjadi tiga kategori yaitu Sektor Pertanian atau *Agriculture* (A), Sektor Industri atau *Manufacture* (M) dan Sektor Jasa atau *Services* (S). Sektor pertanian meliputi lapangan pekerjaan di bidang pertanian tanaman, peternakan, perikanan dan kehutan. Sektor Industri meliputi lapangan pekerjaan di bidang pertambangan/penggalian, industri pengolahan, listrik/gas/air, dan konstruksi. Sedangkan Sektor Jasa meliputi lapangan pekerjaan di bidang perdagangan, transportasi, keuangan dan jasa-jasa. Pekerja/karyawan yang dimaksud dalam subbab ini adalah pekerja/karyawan penerima upah.

Gambar 3.7. Persentase Pekerja/karyawan Menurut Sektor/Lapangan Usaha Utama di D.I. Yogyakarta, Agustus 2019 dan Agustus 2020 (persen)



Sumber : Sakernas Agustus 2019 dan 2020.

Keterangan : Agustus 2019 angka revisi

A = Sektor Pertanian atau *Agriculture* ;

M = Sektor Industri atau *Manufacture*;

S = Sektor Jasa atau Sektor *Services*.

Gambar 3.7 menunjukkan bahwa Sektor Jasa (S) pada Agustus 2019 dan Agustus 2020 merupakan sektor yang paling banyak menyerap pekerja/karyawan dengan kontribusi sebesar 64,70 persen. Terbanyak berikutnya diikuti Sektor Industri (M) sebesar 29,77 persen dan paling sedikit Sektor Pertanian (A) sebesar 5,53 persen. Dibandingkan Agustus 2019, Sektor Jasa (S) maupun Sektor Pertanian (A) pada Agustus 2020 mengalami peningkatan, yaitu secara berurutan meningkat sebesar 1,00 persen poin dan 0,51 persen poin. Sedangkan Sektor Industri (M) pada Agustus 2020 mengalami penurunan sebesar 1,52 persen poin dibandingkan Agustus 2019.

Tabel 3.3. Persentase Pekerja/Karyawan Menurut Sektor/Lapangan Usaha Utama di D.I. Yogyakarta, Agustus 2019 dan Agustus 2020 (persen)

Sektor	Agustus 2019			Agustus 2020		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	5,10	4,89	5,02	5,95	4,89	5,53
M	37,88	21,09	31,29	36,38	19,82	29,77
S	57,02	74,02	63,70	57,67	75,29	64,70
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Sakernas Agustus 2019 dan 2020.

Keterangan : Agustus 2019 angka revisi

A = Sektor Pertanian atau *Agriculture* ;

M = Sektor Industri atau *Manufacture*;

S = Sektor Jasa atau Sektor *Services*.

Demikian pula jika dilihat menurut jenis kelamin, pola serupa juga terjadi pada pekerja/karyawan laki-laki maupun perempuan. Dari Tabel 3.3 terlihat bahwa pada Agustus 2020 pekerja/karyawan laki-laki maupun perempuan terbanyak terserap di Sektor Jasa (S). Pekerja/karyawan laki-laki

yang terserap di Sektor Jasa (S) mencapai 57,67 persen dan pekerja/karyawan perempuan mencapai 75,29 persen. Tingginya pekerja/karyawan perempuan yang terserap di Sektor Jasa (S) dapat dipahami karena sektor ini pada umumnya tidak membutuhkan kemampuan fisik berlebih layaknya Sektor Pertanian (A) dan Sektor Industri (M). Dibandingkan Agustus 2019, pekerja/karyawan laki-laki dan perempuan yang terserap di Sektor Jasa (S) pada Agustus 2020 juga mengalami peningkatan.

Demikian pula dengan Sektor Industri (M), baik laki-laki maupun perempuan pada Agustus 2020 mengalami penurunan sebesar 1,50 persen poin bagi laki-laki dan perempuan turun 1,27 persen poin dibandingkan Agustus 2019. Pada Agustus 2020 Sektor Industri (M) mampu menyerap 36,38 persen pekerja/karyawan laki-laki dan hanya mampu menyerap pekerja/karyawan perempuan 19,82 persen. Sektor Pertanian (A) merupakan sektor yang paling sedikit menyerap tenaga kerja. Pada tahun 2020 Sektor Pertanian (A) hanya mampu menyerap 5,53 persen pekerja/karyawan atau meningkat 0,51 persen poin dibandingkan tahun 2019. Hal serupa juga terjadi pada pekerja/karyawan laki-laki maupun perempuan. Sektor Pertanian (A) menyerap pekerja/karyawan baik laki-laki maupun perempuan paling sedikit. Pada Agustus 2020, Sektor Pertanian (A) hanya mampu menyerap 5,95 persen pekerja/karyawan laki-laki atau meningkat 0,85 persen poin dibandingkan Agustus 2019 dan pekerja/karyawan perempuan relatif stabil, yaitu mampu terserap 4,89 persen.

Tabel 3.3 juga memperlihatkan perkembangan persentase pekerja/karyawan menurut jenis kelamin di masing-masing sektor. Terlihat bahwa pada Agustus 2019 ke Agustus 2020 terjadi pergeseran komposisi menurut lapangan usaha yaitu perubahan kontribusi pada Sektor Pertanian, Sektor

Industri dan Sektor Jasa. Hal serupa juga terjadi pada pekerja/karyawan laki-laki maupun perempuan. Sektor Jasa dan Sektor Pertanian pada Agustus 2020 dibandingkan Agustus 2019 terjadi peningkatan kontribusi penyerapan pekerja/karyawan sebesar 0,65 persen poin pada Sektor Jasa dan 0,85 persen poin pada Sektor Pertanian. Sedangkan pada Sektor Industri pada Agustus 2020 mengalami penurunan sebesar 1,52 persen poin dibandingkan Agustus 2019.

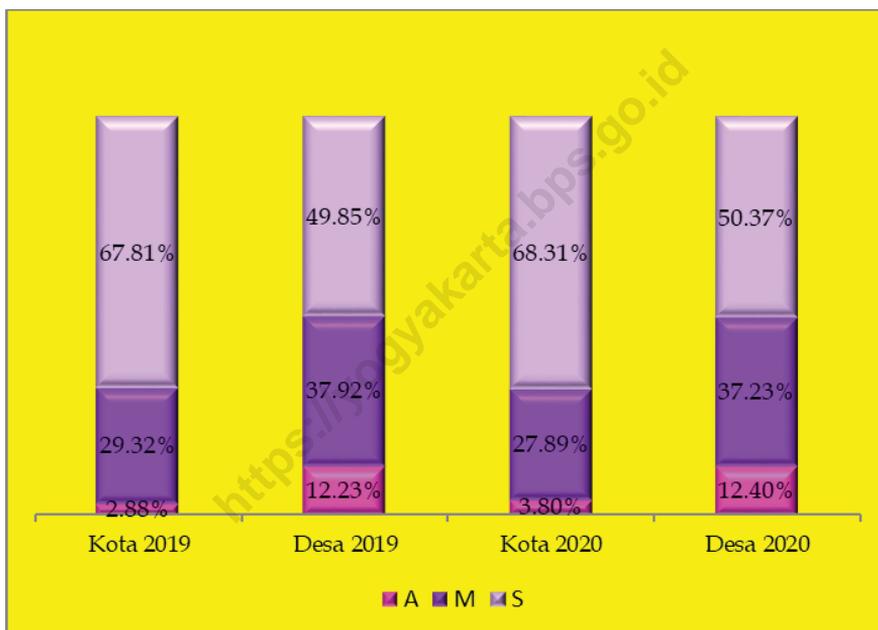
Perubahan kontribusi sektor dalam menyerap pekerja/karyawan pada periode Agustus 2019-Agustus 2020 menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 yang telah menyebabkan cukup banyak industri manufaktur melakukan efisiensi produksi maupun tenaga kerja. Kebijakan pemutusan hubungan kerja dan pengurangan jam kerja sehingga berdampak terhadap penurunan pendapatan pekerja/karyawan. Pekerja/karyawan terdampak selanjutnya beralih bekerja ke sektor lain yang tidak membutuhkan kualifikasi khusus atau bahkan tidak lagi bekerja.

Gambar 3.8 memperlihatkan bahwa pada Agustus 2020 proporsi pekerja/karyawan di perkotaan yang bekerja di Sektor Jasa masih sangat dominan yaitu sebesar 68,31 persen, diikuti Sektor Industri sebesar 27,89 persen dan terendah Sektor Pertanian sebesar 3,80 persen. Komposisi yang sama terjadi di wilayah perdesaan dengan kontribusi Sektor Jasa sebesar 50,37 persen diikuti Sektor Industri sebesar 37,23 persen dan Sektor Pertanian sebesar 12,40 persen.

Gambar 3.8 juga menjelaskan terjadi perbedaan pola pergeseran pada masing-masing sektor selama periode Agustus 2019 dan Agustus 2020. Sektor Jasa (S) memiliki kontribusi paling besar dalam penyerapan pekerja/karyawan. Penyerapan pekerja/karyawan Sektor Jasa (S) pada Agustus 2020 di wilayah perkotaan meningkat 0,50 persen poin dan wilayah perdesaan meningkat sebesar 0,52 persen poin dibandingkan Agustus 2019. Sebaliknya, Sektor

Industri (M) terjadi penurunan kontribusi pekerja/karyawan, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Pekerja/karyawan Sektor Industri (M) di wilayah perkotaan pada Agustus 2020 turun 1,42 persen poin dan di perdesaan turun 0,69 persen poin dibandingkan Agustus 2019.

Gambar 3.8. Persentase Pekerja/Karyawan Menurut Sektor/Lapangan Usaha Utama dan Tipe Daerah di D.I. Yogyakarta, Agustus 2019 dan Agustus 2020 (persen)



Sumber: Sakernas Agustus 2019 dan Agustus 2020
 Keterangan : Agustus 2019 angka revisi

Pada periode yang sama Sektor Pertanian (A) di wilayah perkotaan mengalami peningkatan kontribusi sebesar 0,92 persen poin, yaitu dar 2,88 persen pada Agustus 2019 menjadi 3,80 persen pada Agustus 2020. Demikian pula pekerja/karyawan pada Sektor Pertanian (A) di wilayah perdesaan juga meningkat, yaitu sebesar 0,17 persen poin. Peningkatan jumlah

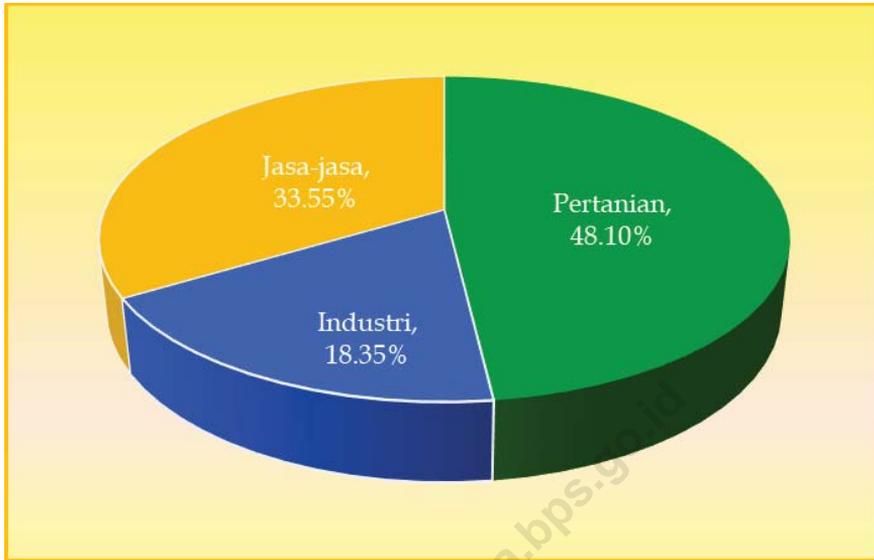
pekerja/karyawan di daerah perkotaan maupun perdesaan kemungkinan disebabkan karena pada masa pandemi Covid-19 ini banyak pekerja/karyawan yang dirumahkan atau di PHK beralih ke Sektor Pertanian (A).

Pekerja keluarga/tidak dibayar merupakan seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha, dengan tidak mendapat upah/gaji baik berupa uang maupun barang. Pekerja tidak dibayar bisa merupakan anggota rumah tangga, maupun bukan anggota rumah tangga tetapi keluarga dari orang yang dibantunya. Seperti pada penjelasan sebelumnya bahwa sebagian besar pekerja keluarga/tidak dibayar adalah perempuan. Gambaran mengenai banyaknya pekerja keluarga/tidak dibayar perempuan menurut lapangan usaha di D.I. Yogyakarta seperti ditunjukkan pada Gambar 3.9.

Sektor Pertanian (A) merupakan sektor yang paling banyak menyerap pekerja keluarga/tidak dibayar perempuan, diikuti Sektor Jasa (S) dan paling sedikit Sektor Industri (M). Selama dua tahun terakhir, komposisi penyerapan pekerja keluarga/tidak dibayar perempuan menurut sektor/lapangan usaha terjadi pergeseran. Pada Agustus 2020, penyerapan pekerja keluarga/tidak dibayar perempuan pada Sektor Pertanian (A) mengalami penurunan sebesar 8,42 persen poin dari 56,52 persen pada Agustus 2019 menjadi 48,10 persen pada Agustus 2020. Sebaliknya Sektor Jasa (S) dan Sektor Industri (M) masing-masing meningkat sebesar 5,46 persen poin untuk Sektor Jasa (S) dan 2,97 persen poin untuk Sektor Industri (M).

Pekerja keluarga/tidak dibayar berjenis kelamin perempuan paling banyak terserap di Sektor Pertanian (A) karena sektor ini merupakan sektor informal yang tidak mensyaratkan pendidikan, latihan, pengalaman/keahlian kerja, dan adanya fleksibilitas waktu sehingga tidak meninggalkan tugas utama perempuan dalam mengurus rumah tangga.

Gambar 3.9. Persentase Pekerja Keluarga/Tak Dibayar Perempuan Menurut Sektor/Lapangan Usaha Utama di D.I. Yogyakarta, Agustus 2020



Sumber: Sakernas Agustus 2020
Keterangan : Agustus 2019 angka revisi

Tabel 3.4. Persentase Pekerja Keluarga/Tak Dibayar Perempuan Menurut Sektor/Lapangan Usaha Utama di D.I. Yogyakarta, Agustus 2019 dan Agustus 2020 (persen)

Lapangan Usaha Utama	2019	2020
(1)	(2)	(3)
<i>Agriculture/Pertanian (A)</i>	56,52	48,10
<i>Manufacture/Industri (M)</i>	15,39	18,35
<i>Service/Jasa (S)</i>	28,09	33,55
Persentase Total	100,00	100,00
Persentase Perempuan Pekerja Keluarga/Tidak Dibayar	19,47	23,99

Sumber: Sakernas Agustus 2019 dan 2020
Keterangan : Agustus 2019 angka revisi

3.4. Pekerja/Karyawan Menurut Pendidikan

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia (SDM) adalah tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh pekerja/karyawan. Pendidikan merupakan modal dasar dalam mengembangkan kemampuan wawasan, intelektual, dan keterampilan seseorang. Seseorang yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta keterampilan kerja sehingga meningkatkan kemampuan bekerja dan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu, kualitas tenaga kerja dapat diindikasikan dengan tingkat pendidikannya. Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan kemampuan kerja juga rendah. Dampaknya akan berpengaruh terhadap rendahnya hasil produksi barang dan jasa, serta rendahnya upah yang diterima pekerja.

Tabel 3.5. Persentase Pekerja/Karyawan Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di D.I. Yogyakarta, Agustus 2019 dan Agustus 2020 (persen)

Tingkat Pendidikan	Agustus 2019			Agustus 2020		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
≤ SLTP	33,59	28,96	31,77	31,67	25,38	29,16
SLTA	48,77	38,17	44,61	49,11	36,32	44,01
>SLTA	17,64	32,87	23,62	19,22	38,30	26,83
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Sakernas Agustus 2019 dan Agustus 2020

Keterangan : Agustus 2019 angka revisi

Tingkat pendidikan pekerja/karyawan di D.I. Yogyakarta pada Agustus 2020 didominasi tingkat pendidikan SLTA ke atas sebanyak 70,84 persen dan sisanya sebanyak 29,16 persen berpendidikan SLTP ke bawah. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pekerja/karyawan di D.I Yogyakarta sudah cukup bagus sehingga diharapkan pekerja/karyawan memiliki kemampuan dan keterampilan bekerja yang lebih baik dalam upaya untuk menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi.

Kondisi pekerja/karyawan pada Agustus 2020 jika dilihat menurut jenis kelamin menunjukkan perbedaan yang cukup berarti. Pekerja/karyawan laki-laki pada Agustus 2020 paling banyak berpendidikan SLTA, yaitu mencapai 49,11 persen. Terbanyak berikutnya berpendidikan SLTP ke bawah (31,67 persen) dan yang berpendidikan perguruan tinggi hanya mencapai 19,22 persen. Berbeda dengan pekerja/karyawan perempuan. Perempuan yang berpendidikan SLTA dan perguruan tinggi hampir seimbang, yaitu 36,32 persen berpendidikan SLTA dan 38,30 persen berpendidikan perguruan tinggi. Sedangkan pekerja/karyawan perempuan yang berpendidikan SLTP ke bawah memiliki persentase paling sedikit (25,38 persen). Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan perempuan di D.I Yogyakarta maka semakin banyak yang terserap sebagai pekerja/karyawan penerima upah. Sedangkan laki-laki yang berstatus pekerja/karyawan penerima upah didominasi mereka yang pendidikan SLTA dan yang berpendidikan perguruan tinggi justru lebih sedikit. Rendahnya laki-laki yang berpendidikan tinggi dibandingkan SLTA kemungkinan disebabkan karena laki-laki yang telah menyelesaikan kuliahnya lebih memilih pekerjaan di luar D.I Yogyakarta yang dianggapnya memberikan penghasilan dan upah minimum yang lebih baik. Sedangkan bagi sebagian

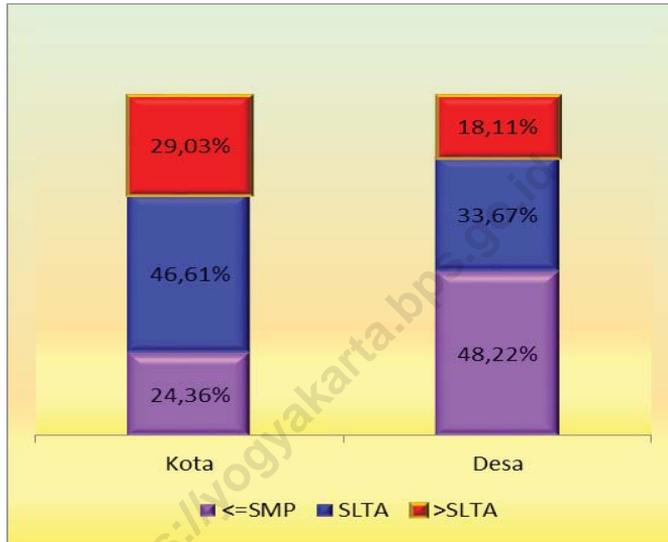
perempuan lebih memilih pekerjaan yang dekat dengan tempat tinggalnya karena mengutamakan mengurus rumah tangga.

Jika dilihat pergeseran struktur tingkat pendidikan pekerja/karyawan periode Agustus 2019 dan Agustus 2020 menunjukkan kecenderungan perbaikan pendidikan. Pekerja/karyawan dengan tingkat pendidikan SLTP ke bawah dan SLTA pada Agustus 2020 mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2019, yaitu masing-masing turun sebesar 2,61 persen poin untuk tingkat pendidikan SLTP ke bawah dan tingkat pendidikan SLTA turun sebesar 0,60 persen poin. Sedangkan pekerja/karyawan dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi mengalami kenaikan sebesar 3,21 persen poin.

Jika dilihat menurut jenis kelamin, pergeseran struktur tingkat pendidikan pekerja/karyawan antara laki-laki dan perempuan mengalami perbedaan. Dibandingkan Agustus 2019, pekerja/karyawan laki-laki di D.I. Yogyakarta pada Agustus 2020 dengan tingkat pendidikan SLTP ke bawah menurun sebesar 1,92 persen poin, sedangkan dengan tingkat pendidikan SLTA dan perguruan tinggi meningkat secara berurutan masing-masing sebesar 0,33 persen poin dan 1,58 persen poin. Berbeda dengan pola pergeseran pekerja/karyawan perempuan. Pekerja/karyawan perempuan dengan tingkat pendidikan SLTP ke bawah dan tingkat pendidikan SLTA mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2019, yaitu berurutan masing-masing turun sebesar 3,58 persen poin dan sebesar 1,85 persen poin. Sedangkan pekerja/karyawan perempuan dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi pada Agustus 2020 justru mengalami peningkatan, yaitu sebesar 5,42 persen poin dibandingkan Agustus 2019. Meningkatnya persentase pekerja/karyawan berpendidikan SLTA ke atas disebabkan adanya kesadaran bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor yang menentukan

tingkat kesejahteraan pekerja/karyawan. Semakin tinggi tingkat pendidikan memberikan gambaran semakin meningkatnya kualitas pekerja/karyawan dan diharapkan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik.

Gambar 3.10. Persentase Pekerja/Karyawan Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Tipe Daerah di D.I. Yogyakarta, Agustus 2020 (persen)



Sumber: Sakernas Agustus 2020

Jika dilihat menurut tipe daerah, komposisi tingkat pendidikan pekerja/karyawan cukup berbeda. Pekerja/karyawan di daerah perkotaan pada Agustus 2020 didominasi mereka yang berpendidikan SLTA, yaitu mencapai 46,61 persen. Kontribusi terbanyak berikutnya pekerja/karyawan dengan pendidikan perguruan tinggi (29,03 persen) dan paling sedikit berpendidikan SLTP ke bawah (24,36 persen). Berbeda dengan pekerja/karyawan di daerah perdesaan paling banyak berpendidikan SLTP ke bawah (48,22 persen). Terbanyak berikutnya pekerja/karyawan yang berpendidikan SLTA (33,67 persen) dan paling sedikit berpendidikan perguruan tinggi yang hanya mencapai 18,11 persen. Lebih baiknya

pendidikan pekerja/karyawan di perkotaan karena ketersediaan infrastruktur pendidikan dan kualifikasi pendidikan pekerja/karyawan yang dibutuhkan perusahaan lebih baik dibandingkan di perdesaan.

3.5. Rata-rata Upah/Gaji Pekerja/Karyawan

Upah merupakan balas jasa terhadap tenaga yang sudah dikeluarkan untuk proses produksi. Oleh karena itu, upah digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan tenaga kerja. Dalam menetapkan kebijakan pengupahan, setiap perusahaan harus berusaha supaya upah terendahnya masih dapat memenuhi kebutuhan fisik minimum pekerjanya. Jika upah yang ditetapkan berada dibawah ketentuan upah minimum, maka hal ini akan menyulitkan perusahaan karena perusahaan dianggap melanggar secara yuridis. Disamping itu juga akan menyebabkan turunnya motivasi kerja, disiplin, dan semangat kerja pekerja yang pada akhirnya akan merugikan perusahaan.

Pekerja dan pengusaha merupakan pasangan yang saling mempengaruhi. Semakin ketatnya persaingan bisnis mengakibatkan perusahaan dihadapkan pada tantangan untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dan memberikan upah layak bagi pekerjanya. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu bersaing dan salah satu alat yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan produktivitas adalah upah. Jika sistem upah dirasakan adil dan kompetitif oleh pekerja, maka perusahaan akan lebih mudah untuk menarik pekerja yang potensial, mempertahankannya, dan memotivasi agar lebih meningkatkan kinerjanya. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan perusahaan mampu menghasilkan produk dengan harga yang kompetitif, unggul dalam persaingan, mampu meningkatkan profitabilitas dan mengembangkan usahanya. Upah mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja pekerja,

selanjutnya dengan kinerja pekerja yang baik pada gilirannya akan mempengaruhi efisiensi dan profitabilitas perusahaan. Dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan pekerja/karyawan serta keluarganya, maka diperlukan berbagai kebijakan dalam penetapan tingkat upah/gaji pekerja/karyawan. Banyak faktor yang menentukan besarnya upah/gaji seorang pekerja/karyawan, antara lain lapangan usaha, tingkat pendidikan, jam kerja dan pengalaman kerja.

Tabel 3.6. Rata-rata Upah/Gaji Sebulan Menurut Sektor/Lapangan Usaha Utama di D.I. Yogyakarta, Agustus 2019 dan Agustus 2020 (Rupiah)

Lapangan Usaha	Agustus 2019			Agustus 2020		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	1.273.666	855.063	1.113.588	1.236.725	928.200	1.127.853
M	2.173.249	1.374.875	1.962.016	1.992.197	1.389.247	1.832.137
S	2.602.333	2.057.970	2.354.005	2.752.394	1.981.252	2.394.482
Total	2.372.025	1.855.112	2.169.119	2.385.621	1.812.408	2.157.006

Sumber: Sakernas Agustus 2019 dan Agustus 2020

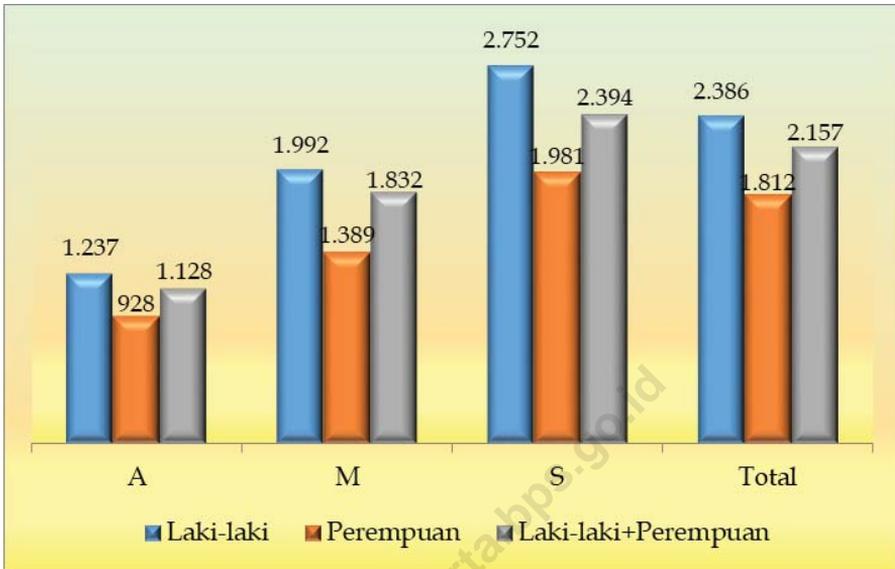
Keterangan : Agustus 2019 angka revisi

Tabel 3.6 menunjukkan rata-rata upah/gaji pekerja/karyawan sebulan menurut sektor/lapangan usaha utama selama 2 tahun terakhir. Secara umum rata-rata upah/gaji pekerja/karyawan pada Agustus 2020 mencapai Rp 2.157.006. Jika dilihat menurut sektor/lapangan usaha, rata-rata upah/gaji tertinggi pada Agustus 2020 diterima oleh pekerja/karyawan di Sektor Jasa (S), yaitu sekitar Rp. 2.394.482, diikuti oleh Sektor Industri (M) sebesar Rp. 1.832.137 dan terendah Sektor Pertanian (A) yang hanya mencapai Rp.

1.127.853. Selama 1 tahun terakhir, rata-rata upah/gaji pekerja/karyawan mengalami penurunan sebesar Rp 12.113. Penurunan terutama dipicu dari Sektor Industri (M), yaitu pada Agustus 2020 turun sekitar 6,62 persen dibandingkan kondisi Agustus 2019. Sedangkan rata-rata upah/gaji pekerja/karyawan pada Sektor Pertanian (A) dan Sektor Jasa (S) meningkat tidak lebih dari 2 persen. Penurunan rata-rata upah/gaji pekerja/karyawan pada Agustus 2020 sebagai dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan beberapa perusahaan melakukan penyesuaian dengan mengurangi jam kerja, merumahkan pekerja/karyawan atau bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja. Kondisi tersebut diduga juga berpengaruh pada upah pekerja/karyawan.

Pola serupa juga terjadi pada upah/gaji pekerja/karyawan menurut jenis kelamin. Rata-rata upah/gaji pekerja/karyawan laki-laki maupun perempuan tertinggi ada pada Sektor Jasa (S), diikuti Sektor Industri (M) dan terendah Sektor Pertanian (A). Dari tabel 3.6 terlihat bahwa upah/gaji pekerja/karyawan laki-laki selalu besar dibandingkan perempuan. Pada Agustus 2020, rata-rata upah/gaji pekerja/karyawan perempuan sebesar Rp. 1.812.408 lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki yang mencapai Rp. 2.385.621 sebulan. Fenomena tingginya upah/gaji pekerja/karyawan laki-laki di D.I. Yogyakarta dibandingkan dengan pekerja/karyawan perempuan terjadi di semua sektor. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan jenis pekerjaan yang dilakukan antara pekerja laki-laki dan perempuan. Hal ini juga dipengaruhi oleh sosial budaya bahwa perempuan mempunyai tugas pokok sebagai ibu rumah tangga, jika terpaksa bekerja hanya sekedar membantu sehingga mungkin tidak mencurahkan tenaga/waktu sepenuhnya, khususnya di pekerjaan yang sifatnya informal.

Gambar 3.11. Rata-rata Upah/Gaji Sebulan Menurut Lapangan Usaha Utama di D.I. Yogyakarta, Agustus 2020 (Ribu Rupiah)



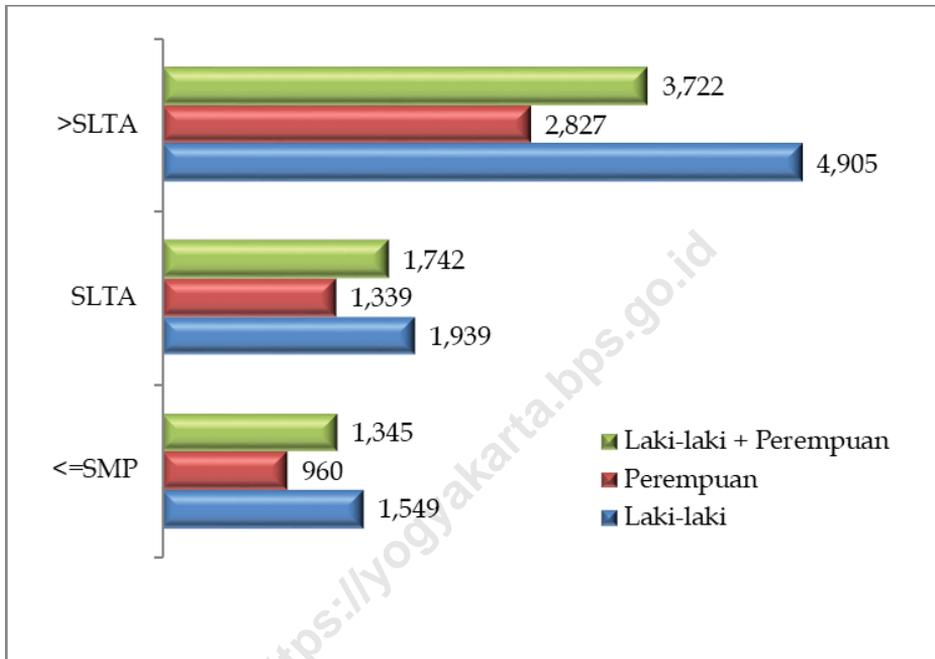
Sumber: Sakernas Agustus 2020

Faktor lain yang dapat menentukan besarnya upah/gaji adalah tingkat pendidikan yang ditamatkan pekerja/karyawan. Berdasarkan Gambar 3.12 terlihat bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan pekerja/keluarga maka semakin tinggi pula upah/gaji yang diterima. Rata-rata upah/gaji yang diterima pekerja/karyawan yang memiliki pendidikan di bawah SLTA masih sangat rendah yaitu berada di bawah rata-rata upah/gaji dari pekerja secara umum, yaitu hanya mencapai Rp.1.344.552.

Rata-rata upah/gaji pekerja/karyawan yang berpendidikan SLTA mencapai Rp 1.741.558 per bulan. Sedangkan pekerja/karyawan yang berpendidikan perguruan tinggi pada Agustus 2020 bahkan mencapai Rp 3.721.623 per bulan atau sekitar dua kali lipat dari rata-rata upah/gaji karyawan secara umum. Jika dilihat menurut jenis kelamin, rata-rata upah/gaji

pekerja/karyawan laki-laki berada di atas rata-rata keseluruhan yaitu sebesar Rp 4.904.515 dan Rp 2.826.567 untuk pekerja/karyawan perempuan.

Gambar 3.12. Rata-rata Upah/Gaji Pekerja/Karyawan Menurut Pendidikan yang Ditamatkan di D.I. Yogyakarta, Agustus 2020 (Ribu Rupiah)



Sumber: Sakernas Agustus 2020

Kenyataan ini memperlihatkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan pekerja/karyawan semakin tinggi pula rata-rata upah/gaji yang diterima. Dengan demikian, salah satu upaya untuk meningkatkan taraf hidup pekerja/karyawan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat secara umum dapat dilakukan melalui pembangunan di bidang pendidikan. Secara khusus melalui pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan kesempatan kerja. Pendidikan dapat meningkatkan produktivitas kerja dan pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan. Peningkatan pendapatan ini berpengaruh pula kepada pendapatan nasional negara dan dapat

meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat berpendapatan rendah. Selain itu, pendidikan sebagai alat untuk menyiapkan tenaga kerja terdidik dan terlatih yang sangat dibutuhkan dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Korelasi antara pendidikan dengan pendapatan lebih signifikan di negara yang sedang berkembang.

3.6. Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota

Data upah minimum yang disajikan merupakan upah minimum kabupaten/kota dan upah minimum provinsi. Menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 disebutkan bahwa upah minimum hanya ditujukan bagi pekerja dengan masa kerja 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) tahun.

Dari definisi tersebut, terdapat dua unsur penting dari upah minimum (Sumarsono, 2003) yaitu:

- a. Upah permulaan adalah upah terendah yang harus diterima oleh buruh pada waktu pertama kali diterima bekerja.
- b. Jumlah upah minimum haruslah dapat memenuhi kebutuhan hidup buruh secara minimal yaitu kebutuhan untuk sandang, pangan dan keperluan rumah tangga.

Kebijakan upah minimum untuk menjamin penghasilan pekerja sehingga tidak lebih rendah dari suatu tingkat tertentu, meningkatkan produktivitas pekerja, mengembangkan dan meningkatkan perusahaan dengan cara-cara produksi yang lebih efisien.

Selama lebih dari 40 tahun sejak upah minimum pertama kali diberlakukan, Indonesia telah 3 kali mengganti standar kebutuhan hidup sebagai dasar penetapan upah minimum. Komponen kebutuhan hidup tersebut meliputi Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) yang berlaku tahun 1969 – 1995, Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) yang berlaku Tahun 1996 – 2005 dan

Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang berlaku tahun 2006 hingga sekarang. Di samping itu, pengertian (definisi) upah minimum, dan istilah-istilahnya juga mengalami beberapa kali perubahan seiring perkembangan dan perubahan regulasi.

Tabel 3.7. Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Provinsi di D.I. Yogyakarta, Tahun 2017 – 2021 (Rupiah)

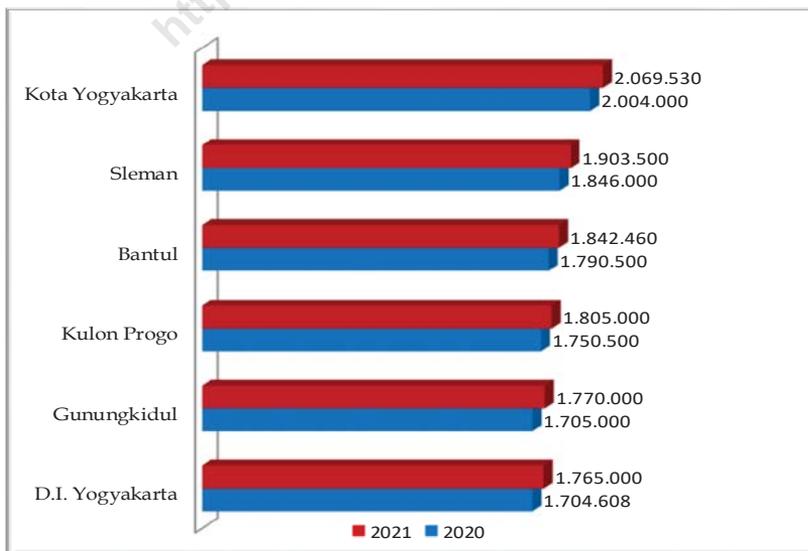
Kabupaten/Kota/ Provinsi	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gunungkidul	1.337.650	1.454.200	1.571.000	1.705.000	1.770.000
Kulon Progo	1.373.600	1.493.250	1.613.200	1.750.500	1.805.000
Bantul	1.404.760	1.572.150	1.649.800	1.790.500	1.842.460
Sleman	1.448.385	1.574.550	1.701.000	1.846.000	1.903.500
Yogyakarta	1.572.200	1.709.150	1.846.4000	2.004.000	2.069.530
D.I. Yogyakarta	1.337.650	1.454.154	1.570.923	1.704.608	1.765.000

Sumber: <https://money.kompas.com/read/2020/11/22/092620026>

Upah Minimum Provinsi (UMP) ditetapkan oleh Gubernur dengan mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan melalui proses panjang. Dewan Pengupahan Provinsi terdiri dari unsur birokrat, akademisi, buruh, dan pengusaha. UMP D.I. Yogyakarta pertama kali ditetapkan pada tahun 2000 sebesar Rp. 194.500 per bulan. Perkembangan UMP setiap tahun selalu mengalami kenaikan dengan mempertimbangkan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian pada masa pandemi Covid-19 serta peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan usaha, maka pada tanggal 18

November 2020 melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 340/KEP/2020 tentang penetapan besaran UMK Kabupaten/Kota Tahun 2021, Gubernur D.I. Yogyakarta menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) D.I.Yogyakarta. UMP D.I Yogyakarta pada tahun 2021 mengalami kenaikan 3,54 persen atau menjadi Rp 1.765.000 dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) naik dengan rata-rata meningkat 3,24 persen dibandingkan upah minimum tahun 2020. Mulai tahun 2013 kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta mempunyai UMK. UMP maupun UMK di D.I. Yogyakarta pada tahun 2019 sudah mencapai di atas 1,5 juta rupiah. Tabel 3.7 menunjukkan bahwa urutan UMK dari yang terkecil sampai terbesar selama 5 (lima) tahun tidak mengalami perubahan. UMK pada tahun 2021 tertinggi ada di Kota Yogyakarta, yaitu mencapai Rp 2.069.530. Tertinggi berikutnya diikuti Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo dan paling sedikit ada di Kabupaten Gunungkidul.

Gambar 3.13. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Provinsi (UMP) di D.I. Yogyakarta, 2020 – 2021 (Rupiah)



Sumber : Disnakertrans DIY, 2020

Sementara itu secara nasional, UMP di Indonesia pada tahun 2020 dan tahun 2021 seperti dikutip dari Kompas.com (Sabtu, 9/01/2021) seperti ditunjukkan pada tabel lampiran 32. Dari data tersebut diketahui UMP D.I. Yogyakarta merupakan yang terendah di Indonesia yaitu sebesar Rp. 1.765.000 UMP tertinggi diraih oleh DKI Jakarta sebesar Rp. 4.416.186 dan rata-rata UMP di Indonesia sebesar Rp. 2.658.152. Rendahnya UMP di D.I. Yogyakarta merupakan implikasi dari rendahnya harga komoditas kebutuhan hidup di daerah ini. Dengan argumen biaya tenaga kerja yang lebih rendah yang berdampak pada rendahnya biaya produksi menjadikan D.I. Yogyakarta sebagai tujuan investasi menarik bagi para pengusaha yang menanamkan modalnya di D.I. Yogyakarta.

3.7. Pasar Tenaga Kerja

Luas wilayah dan distribusi penduduk di perkotaan merupakan penyebab timbulnya permasalahan ketenagakerjaan di D.I. Yogyakarta. Kelengkapan infrastruktur dan fasilitas wilayah perkotaan menjadi daya tarik bagi pencari kerja yang berasal dari perdesaan, sehingga kota menjadi semakin padat. Banyaknya penduduk di perkotaan ini dapat meningkatkan investasi, namun jika tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah lapangan usaha dapat menciptakan atau menambah jumlah pengangguran. Sementara perdesaan memiliki potensi alam yang melimpah dan belum diolah secara optimal dengan penduduk yang masih jarang.

Ketersediaan lapangan pekerjaan suatu wilayah berpengaruh terhadap penyebaran tenaga kerja. Penyebaran tenaga kerja yang tidak merata menyebabkan kurang optimalnya penggunaan sumber daya alam dan manusia. Untuk mengatasi hal ini maka perlu upaya mempertemukan

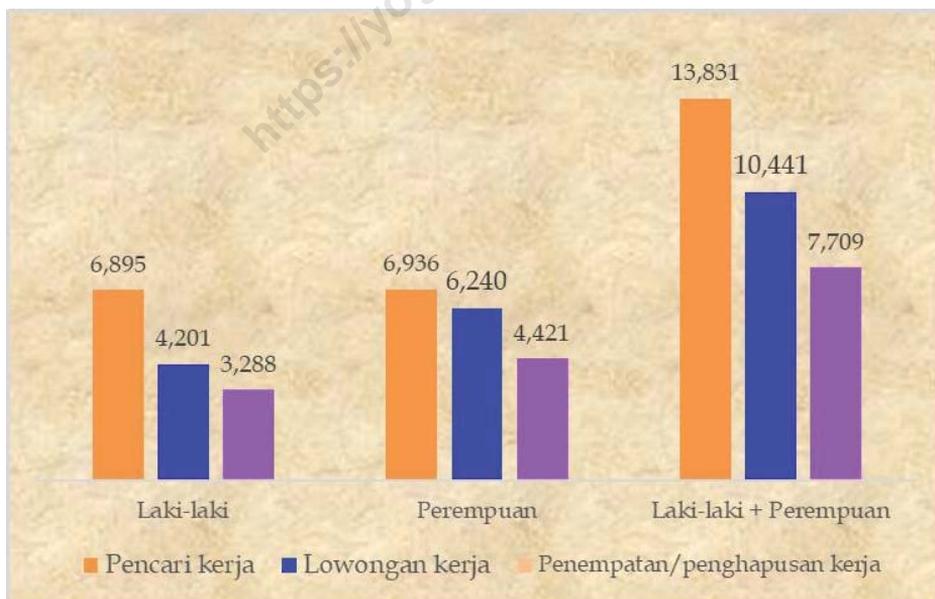
angkatan kerja yang mencari pekerjaan dengan pengusaha yang mempunyai lowongan kerja melalui suatu media yang disebut pasar tenaga kerja. Pasar Tenaga Kerja merupakan seluruh aktivitas dari pelaku-pelaku untuk mempertemukan pencari kerja dengan lowongan kerja, atau proses terjadinya penempatan dan atau hubungan kerja melalui penyediaan dan penempatan tenaga kerja. Pelaku-pelaku yang dimaksud adalah pencari kerja, pemberi kerja dan perantara yang membantu pengusaha dan pencari kerja untuk dapat saling berhubungan.

Pencari kerja merupakan setiap orang yang mencari pekerjaan baik karena menganggur, putus hubungan kerja maupun orang yang sudah bekerja tetapi ingin mendapatkan pekerjaan lebih baik yang sesuai dengan pendidikan, bakat, minat dan kemampuan yang dinyatakan melalui aktivitasnya mencari pekerjaan. Sedangkan pemberi kerja merupakan perorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar imbalan berupa upah atau gaji. Selanjutnya perantara kerja merupakan media atau lembaga yang mempertemukan pencari kerja dan pemberi kerja, misalkan agen penyalur tenaga kerja, bursa kerja dan *headhunters* (pihak ketiga yang menghubungkan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Sebagai imbalan, *headhunters* akan memperoleh persentase gaji dari orang yang diterima bekerja atau komisi dari perusahaan.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja suatu perusahaan, maka pasar tenaga kerja dirasakan dapat memberikan jalan keluar bagi perusahaan. Dalam upaya menciptakan kondisi yang bersinergi antara kedua belah pihak, yaitu antara penjual dan pemberi tenaga kerja maka diperlukan

kerjasama yang baik antara semua pihak yang terkait, yaitu pencari kerja, pemberi kerja dan perantara. Manfaat adanya bursa tenaga kerja untuk membantu para pencari kerja dalam memperoleh pekerjaan sehingga dapat mengurangi pengangguran, membantu orang-orang atau lembaga-lembaga yang memerlukan tenaga kerja untuk mendapatkan tenaga kerja, dan membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan ketenagakerjaan. Data pendaftaran pencari kerja, lowongan kerja (permintaan), dan penempatan kerja (pemenuhan) diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja. Metode pengumpulan data pasar tenaga kerja ini adalah berdasarkan pelaporan sehingga mungkin belum dapat menggambarkan sepenuhnya keadaan pasar tenaga kerja dan hanya digunakan sebagai gambaran kasar saja.

Gambar 3.14. Pasar Tenaga Kerja Menurut Jenis Kelamin di D.I. Yogyakarta, 2020 (orang)



Sumber: Disnakertrans DIY, 2020

Tabel 3.8 memperlihatkan perbandingan antara pencari kerja terhadap lowongan kerja dan penempatan kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) D.I. Yogyakarta. Pada tahun 2020 terdapat sebanyak 13.831 orang pencari kerja dan jumlah lowongan kerja yang tersedia pada tahun 2020 di D.I Yogyakarta sebanyak 10.441 orang (75,49 persen). Kompetisi pencari kerja untuk mengisi lowongan kerja di D.I Yogyakarta tidak hanya diikuti pencari kerja dari D.I Yogyakarta akan tetapi juga pencari kerja dari luar D.I Yogyakarta. Selanjutnya dari 17.186 pencari kerja di D.I Yogyakarta, 7.709 pencari kerja di D.I Yogyakarta atau 55,74 persen berhasil ditempatkan. Hal ini mengandung arti bahwa setiap 100 orang pencari kerja pada tahun 2020 yang berhasil ditempatkan sekitar 56 orang pencari kerja dengan penempatan di wilayah D.I Yogyakarta maupun luar D.I. Yogyakarta.

Tabel 3.8. Pasar Tenaga Kerja Menurut Jenis Kelamin di D.I. Yogyakarta, 2019-2020 (orang)

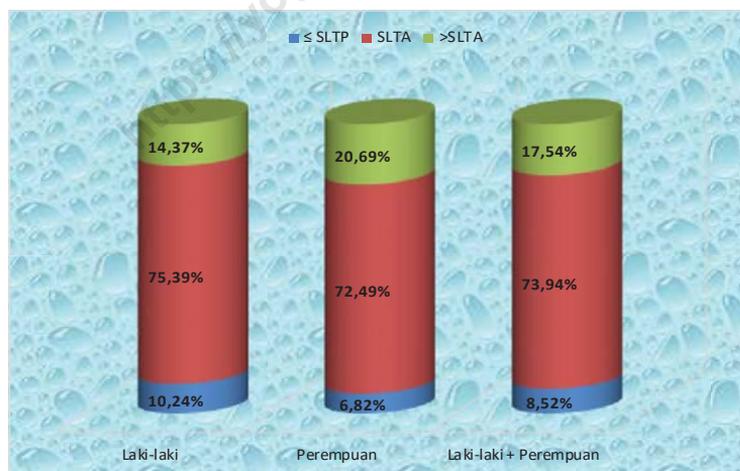
Indikator	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Pencari Kerja			
2019	7.415	9.771	17.186
2020	6.895	6.936	13.831
Lowongan Kerja			
2019	10.464	13.139	23.603
2020	4.201	6.240	10.411
Penempatan			
2019	3.833	5.288	9.121
2020	3.288	4.421	7.709

Sumber: Disnakertrans D.I. Yogyakarta, 2019 – 2020

Kondisi pasar tenaga kerja pada tahun 2020 jika dilihat menurut jenis kelamin, terlihat bahwa jumlah pencari kerja laki-laki di D.I Yogyakarta terdapat sebanyak 6.895 orang dengan jumlah lowongan kerjanya sebanyak 4.201 orang (sekitar 60,93 persen) dan berhasil ditempatkan sebanyak 3.288 orang (sekitar 47,40 persen). Sedangkan pencari kerja perempuan ada sebanyak 6.936 orang dengan jumlah lowongan kerja sebanyak 6.240 (sekitar 89,97 persen) dan penempatan sebanyak 4.421 orang (sekitar 31,96 persen).

Dilihat menurut tingkat pendidikan, pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi D.I Yogyakarta pada tahun 2020 paling banyak berpendidikan SLTA, yaitu mencapai 73,94 persen. Terbanyak berikutnya berijasah perguruan tinggi yang mencapai 17,54 persen dan paling sedikit 8,52 persen berpendidikan SLTP ke bawah.

Gambar 3.15. Pencari Kerja yang Terdaftar di Disnakertrans D.I. Yogyakarta Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin, 2020 (persen)



Sumber: Disnakertrans D.I. Yogyakarta, diolah 2020

Pola serupa juga terjadi jika dilihat menurut jenis kelamin. Pencari kerja laki-laki maupun perempuan terbanyak berpendidikan SLTA, masing-masing mencapai 75,39 persen bagi laki-laki dan 72,49 persen bagi perempuan.

Berikutnya pencari kerja berpendidikan perguruan tinggi, yaitu pencari kerja laki-laki mencapai 14,37 persen dan pencari kerja perempuan mencapai 20,69 persen. Pencari kerja paling sedikit berpendidikan SLTP ke bawah.

Dalam upaya memberikan kesempatan kerja bagi pencari kerja, pemerintah terus berupaya membuka kesempatan kerja di dalam negeri maupun di luar negeri. Tenaga kerja yang memperoleh kesempatan bekerja di luar negeri dikenal dengan nama Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Tabel 3.9 menyajikan data jumlah tenaga kerja yang bekerja di luar negeri. Pada tahun 2020 berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota se-D.I Yogyakarta, jumlah tenaga kerja D.I. Yogyakarta yang diproses untuk bekerja ke luar negeri mencapai 192 orang yang terdiri dari 66 orang laki-laki (34,38 persen) dan 126 orang perempuan (65,62 persen). Jumlah tenaga kerja perempuan lebih banyak dibandingkan tenaga kerja laki-laki. Hal ini menunjukkan kesempatan kerja bagi perempuan di luar negeri lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki.

Tabel 3.9. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Menurut Asal Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Tahun 2020 (orang)

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Kulonprogo	42	81	123
Bantul	6	15	21
Gunungkidul	2	11	13
Sleman	15	16	31
Yogyakarta	1	3	4
D.I. Yogyakarta	66	126	192

Sumber: Disnaker Kabupaten/Kota D.I. Yogyakarta, 2020

Jika dilihat menurut kabupaten/kota, penyumbang TKI terbanyak di D.I. Yogyakarta berasal dari Kabupaten Kulon Progo, yaitu sebanyak 123 orang dengan rincian 42 orang laki-laki dan 81 orang perempuan. Selanjutnya TKI terbanyak berikutnya diikuti Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan paling sedikit berasal dari Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta merupakan wilayah penyumbang TKI dari D.I Yogyakarta yang paling sedikit yaitu hanya sebanyak 4 orang terdiri dari 1 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Rendahnya penduduk Kota Yogyakarta yang memilih menjadi TKI disebabkan karena banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia.

<https://yogyakarta.bps.go.id>

4.1 Kesimpulan

Pada tahun 2020 kondisi ketenagakerjaan di D.I. Yogyakarta mengalami kemunduran yang cukup berarti. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah pengangguran sebagai dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan terjadinya pengurangan jam kerja karyawan, pekerja dirumahkan, maupun pemutusan hubungan kerja. Jumlah angkatan kerja D.I. Yogyakarta pada Agustus 2020 sebanyak 2,23 juta orang, meningkat 1,10 persen dibanding tahun 2019. Angkatan kerja tersebut terdiri dari 2,13 juta orang yang bekerja dan 102 ribu orang pengangguran. Jumlah penduduk yang bekerja menurun 2,22 persen atau sekitar 48 ribu orang, sedangkan pengangguran meningkat 42,48 persen atau sekitar 30 ribu orang. Pada Agustus 2020, TPAK di D.I. Yogyakarta sebesar 71,12 persen, menurun 1,60 persen poin dibandingkan Agustus 2019 yang mencapai 72,72 persen. Hal ini disebabkan peningkatan jumlah penduduk usia kerja lebih besar dibanding peningkatan jumlah angkatan kerja sehingga mengakibatkan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) menurun. Sejalan dengan hal ini, rasio penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk usia kerja atau *Employment to Population Ratio* (EPR) juga menurun, dari 70,41 persen pada Agustus 2019 menjadi 67,87 persen pada Agustus 2020. TPAK dan EPR penduduk laki-laki lebih besar dibanding penduduk perempuan, demikian juga TPAK dan EPR perdesaan lebih besar dibanding perkotaan.

Dilihat dari sisi status pekerjaan, tenaga kerja yang status/kedudukannya lebih tinggi seperti pengusaha atau pekerja/karyawan

tetap jumlahnya menurun sedangkan tenaga kerja yang kedudukannya rendah seperti pekerja bebas dan pekerja keluarga/tidak dibayar jumlahnya bertambah. Pada Agustus 2020, jumlah pengusaha sebanyak 39,52 persen yang terdiri dari 18,13 persen berusaha sendiri dan 21,39 persen berusaha dibantu orang lain. Jumlah pekerja/karyawan sebanyak 46,00 persen yang terdiri dari buruh/karyawan/pekerja tetap 38,78 persen, pekerja bebas di pertanian 1,70 persen, dan pekerja bebas di non pertanian 5,52 persen. Banyaknya pekerja/karyawan penerima upah pada Agustus 2020 menurun 5,46 persen poin yang disebabkan oleh menurunnya jumlah karyawan tetap sebesar 5,49 persen poin dan pekerja bebas di sektor pertanian sebesar 0,31 persen poin, serta meningkatnya pekerja bebas di sektor non pertanian sebesar 0,34 persen poin. Jumlah pekerja keluarga/tidak dibayar sebanyak 308 ribu orang atau meningkat 2,97 persen poin (58 ribu orang). Banyaknya pekerja keluarga/tidak dibayar untuk perempuan (23,99 persen) lebih banyak dibanding yang laki-laki (6,17 persen). Kondisi ini disebabkan perempuan berperan ganda yakni sebagai pekerja domestik di rumah tangga dan pencari nafkah sehingga waktu kerja dan perhatiannya terbatas. Pekerja/karyawan sebagian besar tinggal di perkotaan, sedangkan pengusaha dan pekerja keluarga/tidak dibayar sebagian besar tinggal di perdesaan.

Sektor Jasa yang terdiri dari bidang perdagangan, transportasi, keuangan dan jasa-jasa merupakan lapangan usaha yang paling banyak digeluti oleh pekerja/karyawan di D.I. Yogyakarta. Pada tahun 2020, pekerja/karyawan di D.I. Yogyakarta yang bekerja di Sektor Jasa sebanyak 64,70 persen (633 ribu orang) yang terdiri dari 39,88 persen perempuan dan 60,12 persen laki-laki. Posisi kedua diduduki Sektor Industri sebanyak 29,77 persen (291 ribu orang), 26,55 persen diantaranya adalah perempuan dan

73,45 laki-laki. Sektor paling kecil peminatnya adalah Sektor Pertanian dengan kontribusi sebanyak 5,53 persen (54 ribu jiwa), terdiri dari 35,29 persen perempuan dan 64,71 persen laki-laki. Umumnya kegiatan usaha dilakukan di wilayah perkotaan dengan perbandingan 79,87 di perkotaan dan 20,13 di perdesaan.

Pendidikan merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kualitas tenaga kerja. Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan kemampuan kerja rendah. Dampaknya akan berpengaruh terhadap rendahnya hasil produktifitas barang dan jasa, serta rendahnya upah yang diterima pekerja. Tingkat pendidikan pekerja/karyawan di D.I. Yogyakarta tergolong cukup. Sebagian besar berpendidikan SLTA yakni 44,01 persen, 29,16 persen berpendidikan SMP ke bawah, dan 26,83 persen berpendidikan Perguruan Tinggi. Tingkat pendidikan pekerja/karyawan perempuan di D.I. Yogyakarta lebih baik dibandingkan pekerja/karyawan laki-laki. Hal ini ditunjukkan persentase pekerja/karyawan perempuan yang berpendidikan SLTA ke atas lebih baik dibandingkan pekerja/karyawan laki-laki. Namun karena laki-laki sebagai tulang punggung rumah tangga maka meskipun pendidikannya rendah mereka tetap bekerja, sedangkan perempuan lebih banyak menjalankan tugas pokok di rumah tangganya, atau bekerja sebagai pekerja bebas sesuai kemampuan dan ketersediaan waktu yang dimilikinya untuk menambah penghasilan keluarga.

Upah merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan karyawan/pekerja. Secara umum upah yang diterima pekerja/karyawan di D.I. Yogyakarta pada Agustus 2020 sebesar Rp. 2.157.006 dan turun Rp. 12.114 jika dibandingkan Agustus 2019. Dari sisi sektor usaha, upah tertinggi diraih oleh pekerja/karyawan yang bekerja di Sektor Jasa (Rp. 2.394.482), diikuti

Sektor Industri (Rp. 1.832.137), dan terendah Sektor Pertanian (Rp. 1.127.853). Secara umum rata-rata upah pekerja/karyawan meningkat, kecuali Sektor Industri justru menurun. Penurunan rata-rata upah pekerja/karyawan Sektor Industri sebagai akibat menurunnya upah pekerja/karyawan laki-laki. Dari sisi pendidikan terlihat semakin tinggi tingkat pendidikan pekerja/karyawan semakin tinggi pula upah/gaji yang diterima. Rata-rata upah yang diterima pekerja/karyawan yang berpendidikan perguruan tinggi sebesar Rp. 3.721.623, sedangkan tingkat SLTA sebesar Rp. 1.741.558 dan tingkat SMP ke bawah hanya mencapai Rp. 1.344.552. Secara umum rata-rata upah pekerja/karyawan perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini menunjukkan masih adanya diskriminasi gender upah di D.I. Yogyakarta.

Salah satu tujuan orang bekerja adalah mendapatkan upah layak. Setiap tahun Upah Minimum Provinsi (UMP) yang distandarkan oleh pemerintah terus dinaikkan tetapi belum menjawab tuntutan kesejahteraan pekerja. UMP di D.I. Yogyakarta pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.765.000 dan menduduki posisi terendah di Indonesia. Urutan besarnya UMK di D.I. Yogyakarta mulai dari yang tertinggi adalah Kota Yogyakarta, diikuti Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo dan terendah Gunungkidul. Rendahnya biaya hidup di D.I. Yogyakarta dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia menyebabkan besaran UMP D.I. Yogyakarta terendah di Indonesia.

Pada tahun 2020 kondisi pasar tenaga kerja di D.I. Yogyakarta cukup dinamis. Jumlah pencari kerja sebanyak 14 ribu orang dan menurun dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 17 ribu orang. Secara kuantitatif pencari kerja laki-laki lebih sedikit dibandingkan perempuan, demikian juga secara kualitas (tingkat pendidikan) didominasi pencari pekerja dengan

kualifikasi tingkat pendidikan SLTA ke atas. Kondisi ini kemungkinan berkaitan dengan jenjang pendidikan sebelumnya, perempuan ternyata lebih banyak yang melanjutkan pendidikan setelah tamat SLTA. Dengan pendidikan lebih tinggi diharapkan mereka lebih berkompeten sehingga dapat bersaing dengan pencari kerja dari daerah lain dan mendapat pekerjaan yang lebih baik serta upah yang lebih tinggi.

Pada tahun 2020 jumlah tenaga kerja Indonesia dari D.I. Yogyakarta yang bekerja di luar negeri sebanyak 192 orang, terdiri dari 126 orang perempuan dan 66 orang laki-laki. Kontribusi kabupaten/kota dalam pengiriman TKI ke luar negeri, berturut-turut dari yang terbesar adalah Kabupaten Kulon Progo diikuti Kabupaten Sleman, Bantul, Gunungkidul dan terendah Kota Yogyakarta.

4.2. Saran

Banyaknya pengurangan jam kerja karyawan, pemutusan hubungan kerja dan berkurangnya pendapatan penduduk akibat dari pandemi Covid-19 menyebabkan peningkatan pengangguran dan kemiskinan yang berdampak pada penurunan kesejahteraan penduduk. Untuk itu perlu dilakukan berbagai usaha sehingga jumlah pengangguran tidak semakin bertambah, diantaranya adalah :

✓ Melakukan efisiensi

Adanya pemangkasan jumlah tenaga kerja dan menurunnya permintaan produksi, maka para pengusaha maupun pelaku industri harus melakukan efisiensi agar usahanya tetap bisa operasional. Demikian juga, menurunnya pendapatan karyawan harus diikuti dengan efisiensi pengeluaran agar kesejahteraannya tetap terjaga, sehat, dan produktif.

✓ Kreatif dan semangat berusaha

Bagi pekerja yang mengalami PHK atau pengurangan jam kerja, hendaknya kreatif menciptakan usaha lain, atau alih profesi sehingga tidak menganggur.

- ✓ Memanfaatkan bantuan Pemerintah atau lembaga lain untuk kegiatan produktif. Misalnya Kartu Prakerja, bimbingan/latihan kerja.

Pendidikan pekerja/karyawan perempuan di D.I. Yogyakarta semakin baik. Namun demikian, jumlah perempuan yang berstatus sebagai pekerja bebas dan pekerja keluarga/tidak dibayar masih lebih banyak dibanding laki-laki, demikian juga untuk upah yang diterima pekerja/karyawan perempuan lebih rendah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesejahteraan hidup tenaga kerja perempuan maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- ✓ Meningkatkan pendidikan dan pengalaman kerja di dunia usaha.
Tingkat pendidikan dan pengalaman kerja yang rendah menyebabkan tenaga kerja tidak mampu terserap di lapangan kerja. Untuk itu perlu dilakukan kegiatan magang kerja guna menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.
- ✓ Mengikuti pelatihan kerja yang meliputi kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan yang berhubungan dengan pekerjaan dan persyaratan pekerjaan sehingga dapat terserap di lapangan kerja yang tersedia dan menjadi lebih produktif.
- ✓ Pengembangan industri padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja yang lebih besar dengan pengembangan pekerjaan umum seperti pengadaan proyek pembangunan jalan, pembuatan saluran air/irigasi, pembuatan jembatan, dan perbaikan jalan sehingga dapat mengurangi pengangguran.

- ✓ Meningkatkan penanaman modal dalam negeri untuk menciptakan atau menambah lapangan kerja.
- ✓ Melakukan sosialisasi Undang-undang ketenagakerjaan di perusahaan-perusahaan agar pekerja/karyawan perempuan mendapatkan hak dan upah sesuai ketentuan yang ada.

<https://yogyakarta.bps.go.id>

Lampiran

<https://yogyakartadapps.go.id>

Lampiran 1. Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2020

No	Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas			
	Kulon Progo	167.830	178.141	345.971
	Bantul	403.466	415.798	819.264
	Gunungkidul	289.616	319.886	609.502
	Sleman	500.591	497.327	997.918
	Yogyakarta	173.133	186.966	360.099
	D.I. Yogyakarta	1.534.636	1.598.118	3.132.754
2.	Angkatan Kerja			
	Kulon Progo	144.449	124.977	269.426
	Bantul	339.974	269.969	609.943
	Gunungkidul	191.063	206.972	398.035
	Sleman	392.062	311.604	703.666
	Yogyakarta	132.485	114.607	247.092
	D.I. Yogyakarta	1.200.033	1.028.129	2.228.162
3.	Bukan Angkatan Kerja			
	Kulon Progo	23.381	53.164	76.545
	Bantul	63.492	145.829	209.321
	Gunungkidul	98.553	112.914	211.467
	Sleman	108.529	185.723	294.252
	Yogyakarta	40.648	72.359	113.007
	D.I. Yogyakarta	334.603	569.989	904.592

Sumber: Sakernas Agustus 2020

Lampiran 2. Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Tipe Daerah, 2020

No	Kabupaten/Kota	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas			
	Kulon Progo	105.341	240.630	345.971
	Bantul	751.918	67.346	819.264
	Gunungkidul	106.635	502.867	609.502
	Sleman	987.206	10.712	997.918
	Yogyakarta	360.099	-	360.099
	D.I. Yogyakarta	2.311.199	821.555	3.132.754
2.	Angkatan Kerja			
	Kulon Progo	74.629	194.797	269.426
	Bantul	560.447	49.496	609.943
	Gunungkidul	63.405	334.630	398.035
	Sleman	696.064	7.602	703.666
	Yogyakarta	247.092	-	247.092
	D.I. Yogyakarta	1.641.637	586.525	2.228.162
3.	Bukan Angkatan Kerja			
	Kulon Progo	30.712	45.833	76.545
	Bantul	191.471	17.850	209.321
	Gunungkidul	43.230	168.237	211.467
	Sleman	291.142	3.110	294.252
	Yogyakarta	113.007	-	113.007
	D.I. Yogyakarta	669.562	235.030	904.592

Sumber: Sakernas Agustus 2020

Lampiran 3. Jumlah Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2020

No	Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Bekerja			
	Kulon Progo	138.595	120.826	259.421
	Bantul	322.739	262.421	585.160
	Gunungkidul	185.748	203.696	389.444
	Sleman	371.287	296.536	667.823
	Yogyakarta	117.216	107.252	224.468
	D.I. Yogyakarta	1.135.585	990.731	2.126.316
2.	Pengangguran			
	Kulon Progo	5.854	4.151	10.005
	Bantul	17.235	7.548	24.783
	Gunungkidul	5.315	3.276	8.591
	Sleman	20.775	15.068	35.843
	Yogyakarta	15.269	7.355	22.624
	D.I. Yogyakarta	64.448	37.398	101.846
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)			
	Kulon Progo	4,05	3,32	3,71
	Bantul	5,07	2,80	4,06
	Gunungkidul	2,78	1,58	2,16
	Sleman	5,30	4,84	5,09
	Yogyakarta	11,53	6,42	9,16
	D.I. Yogyakarta	5,37	3,64	4,57

Sumber: Sakernas Agustus 2020

Lampiran 4. Jumlah Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Tipe Daerah, 2020

No	Kabupaten/Kota	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Bekerja			
	Kulon Progo	70.973	188.448	259.421
	Bantul	536.407	48.753	585.160
	Gunungkidul	60.310	329.134	389.444
	Sleman	660.418	7.405	667.823
	Yogyakarta	224.468	-	224.468
	D.I. Yogyakarta	1.552.576	573.740	2.126.316
2.	Pengangguran			
	Kulon Progo	3.656	6.349	10.005
	Bantul	24.040	743	24.783
	Gunungkidul	3.095	5.496	8.591
	Sleman	35.646	197	35.843
	Yogyakarta	22.624	-	22.624
	D.I. Yogyakarta	89.061	12.785	101.846
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)			
	Kulon Progo	4,90	3,26	3,71
	Bantul	4,29	1,50	4,06
	Gunungkidul	4,88	1,64	2,16
	Sleman	5,12	2,59	5,09
	Yogyakarta	9,16	-	9,16
	D.I. Yogyakarta	5,43	2,18	4,57

Sumber: Sakernas Agustus 2020

Lampiran 5. TKK dan TPAK Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2020

No	Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)			
	Kulon Progo	95,95	96,68	96,29
	Bantul	94,93	97,20	95,94
	Gunungkidul	97,22	98,42	97,84
	Sleman	94,70	95,16	94,91
	Yogyakarta	88,47	93,58	90,84
	D.I. Yogyakarta	94,63	96,36	95,43
2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)			
	Kulon Progo	86,07	70,16	77,88
	Bantul	84,26	64,93	74,45
	Gunungkidul	65,97	64,70	65,30
	Sleman	78,32	62,66	70,51
	Yogyakarta	76,52	61,30	68,62
	D.I. Yogyakarta	78,20	64,33	71,12

Sumber: Sakernas Agustus 2020

Lampiran 6. TKK dan TPAK Menurut Kabupaten/Kota dan dan Tipe Daerah, 2020

No	Kabupaten/Kota	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)			
	Kulon Progo	95,10	96,74	96,29
	Bantul	95,71	98,50	95,94
	Gunungkidul	95,12	98,36	97,84
	Sleman	94,88	97,41	94,91
	Yogyakarta	90,84	-	90,84
	D.I. Yogyakarta	94,57	97,82	95,43
2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)			
	Kulon Progo	70,85	80,95	77,88
	Bantul	74,54	73,50	74,45
	Gunungkidul	59,46	66,54	65,30
	Sleman	70,51	70,97	70,51
	Yogyakarta	68,62	-	68,62
	D.I. Yogyakarta	71,03	71,39	71,12

Sumber: Sakernas Agustus 2020

Lampiran 7. Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Kabupaten/Kota, Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, dan Jenis Kelamin, 2020

No	Kabupaten/Kota	≤ SLTP	SLTA	PT	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Laki-laki				
	Kulon Progo	60.055	63.649	14.891	138.595
	Bantul	131.786	148.720	42.233	322.739
	Gunungkidul	133.064	42.195	10.489	185.748
	Sleman	100.265	186.656	84.366	371.287
	Yogyakarta	31.512	57.929	27.775	117.216
	D.I. Yogyakarta	456.682	499.149	179.754	1.135.585
2.	Perempuan				
	Kulon Progo	62.039	38.329	20.458	120.826
	Bantul	114.511	89.861	58.049	262.421
	Gunungkidul	150.620	35.774	17.302	203.696
	Sleman	91.407	122.657	82.472	296.536
	Yogyakarta	33.583	44.243	29.426	107.252
	D.I. Yogyakarta	452.160	330.864	207.707	990.731
3.	Laki-laki + Perempuan				
	Kulon Progo	122.094	101.978	35.349	259.421
	Bantul	246.297	238.581	100.282	585.160
	Gunungkidul	283.684	77.969	27.791	389.444
	Sleman	191.672	309.313	166.838	667.823
	Yogyakarta	65.095	102.172	57.201	224.468
	D.I. Yogyakarta	908.842	830.013	387.461	2.126.316

Sumber: Sakernas Agustus 2020

Lampiran 8. Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Kabupaten/Kota, Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, dan Tipe Daerah, 2020

No	Kabupaten/Kota	≤ SLTP	SLTA	PT	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Perkotaan				
	Kulon Progo	27.599	32.166	11.208	70.973
	Bantul	211.024	227.194	98.189	536.407
	Gunungkidul	31.732	21.128	7.450	60.310
	Sleman	189.430	306.142	164.846	660.418
	Yogyakarta	65.095	102.172	57.201	224.468
	D.I. Yogyakarta	524.880	688.802	338.894	1.552.576
2.	Perdesaan				
	Kulon Progo	94.495	69.812	24.141	188.448
	Bantul	35.273	11.387	2.093	48.753
	Gunungkidul	251.952	56.841	20.341	329.134
	Sleman	2.242	3.171	1.992	7.405
	Yogyakarta	-	-	-	-
	D.I. Yogyakarta	383.962	141.211	48.567	573.740
3.	Perkotaan + Perdesaan				
	Kulon Progo	122.094	101.978	35.349	259.421
	Bantul	246.297	238.581	100.282	585.160
	Gunungkidul	283.684	77.969	27.791	389.444
	Sleman	191.672	309.313	166.838	667.823
	Yogyakarta	65.095	102.172	57.201	224.468
	D.I. Yogyakarta	908.842	830.013	387.461	2.126.316

Sumber: Sakernas Agustus 2020

Lampiran 9. Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Kabupaten/Kota, Sektor/Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin, 2020

No	Sektor/Lapangan Usaha	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kulon Progo	138.595	120.826	259.421
	a. Sektor Pertanian	45.882	35.553	81.435
	b. Sektor Industri	40.488	31.777	72.265
	c. Sektor Jasa	52.225	53.496	105.721
2.	Bantul	322.739	262.421	585.160
	a. Sektor Pertanian	54.746	38.925	93.671
	b. Sektor Industri	91.309	64.732	156.041
	c. Sektor Jasa	176.684	158.764	335.448
3.	Gunungkidul	185.748	203.696	389.444
	a. Sektor Pertanian	73.357	92.793	166.150
	b. Sektor Industri	61.538	44.472	106.010
	c. Sektor Jasa	50.853	66.431	117.284
4.	Sleman	371.287	296.536	667.823
	a. Sektor Pertanian	51.975	33.238	85.213
	b. Sektor Industri	85.659	53.410	139.069
	c. Sektor Jasa	233.653	209.888	443.541
5.	Kota Yogyakarta	117.216	107.252	224.468
	a. Sektor Pertanian	1.899	606	2.505
	b. Sektor Industri	24.319	16.306	40.625
	c. Sektor Jasa	90.998	90.340	181.338

Sumber: Sakernas Agustus 2020

**Lampiran 10. Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Kabupaten/Kota,
Sektor/Lapangan Usaha dan Tipe Daerah, 2020**

No	Sektor/Lapangan Usaha	Perkotaan	Perdesaan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kulon Progo	70.973	188.448	259.421
	a. Sektor Pertanian	15.888	65.547	81.435
	b. Sektor Industri	19.188	53.077	72.265
	c. Sektor Jasa	35.897	69.824	105.721
2.	Bantul	536.407	48.753	585.160
	a. Sektor Pertanian	75.450	18.221	93.671
	b. Sektor Industri	139.943	16.098	156.041
	c. Sektor Jasa	321.014	14.434	335.448
3.	Gunungkidul	60.310	329.134	389.444
	a. Sektor Pertanian	13.870	152.280	166.150
	b. Sektor Industri	12.740	93.270	106.010
	c. Sektor Jasa	33.700	83.584	117.284
4.	Sleman	660.418	7.405	667.823
	a. Sektor Pertanian	83.502	1.711	85.213
	b. Sektor Industri	137.870	1.199	139.069
	c. Sektor Jasa	439.046	4.495	443.541
5.	Kota Yogyakarta	224.468	-	224.468
	a. Sektor Pertanian	2.505	-	2.505
	b. Sektor Industri	40.625	-	40.625
	c. Sektor Jasa	181.338	-	181.338

Sumber: Sakernas Agustus 2020

Lampiran 11. Jumlah Penduduk Bekerja menurut Kabupaten/Kota, Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, dan Jenis Kelamin, 2020

No	Kabupaten/Kota	≤ SLTP	SLTA	PT	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Laki-laki				
	Kulon Progo	60.055	63.649	14.891	138.595
	Bantul	131.786	148.720	42.233	322.739
	Gunungkidul	133.064	42.195	10.489	185.748
	Sleman	100.265	186.656	84.366	371.287
	Yogyakarta	31.512	57.929	27.775	117.216
	D.I. Yogyakarta	456.682	499.149	179.754	1.135.585
2.	Perempuan				
	Kulon Progo	62.039	38.329	20.458	120.826
	Bantul	114.511	89.861	58.049	262.421
	Gunungkidul	150.620	35.774	17.302	203.696
	Sleman	91.407	122.657	82.472	296.536
	Yogyakarta	33.583	44.243	29.426	107.252
	D.I. Yogyakarta	452.160	330.864	207.707	990.731
3.	Laki-laki + Perempuan				
	Kulon Progo	122.094	101.978	35.349	259.421
	Bantul	246.297	238.581	100.282	585.160
	Gunungkidul	283.684	77.969	27.791	389.444
	Sleman	191.672	309.313	166.838	667.823
	Yogyakarta	65.095	102.172	57.201	224.468
	D.I. Yogyakarta	908.842	830.013	387.461	2.126.316

Sumber: Sakernas Agustus 2020

Lampiran 12. Jumlah Penduduk Bekerja menurut Kabupaten/Kota, Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, dan Tipe Daerah, 2020

No	Kabupaten/Kota	≤ SLTP	SLTA	PT	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Perkotaan				
	Kulon Progo	27.599	32.166	11.208	70.973
	Bantul	211.024	227.194	98.189	536.407
	Gunungkidul	31.732	21.128	7.450	60.310
	Sleman	189.430	306.142	164.846	660.418
	Yogyakarta	65.095	102.172	57.201	224.468
	D.I. Yogyakarta	524.880	688.802	338.894	1.552.576
2.	Pedesaan				
	Kulon Progo	94.495	69.812	24.141	188.448
	Bantul	35.273	11.387	2.093	48.753
	Gunungkidul	251.952	56.841	20.341	329.134
	Sleman	2.242	3.171	1.992	7.405
	Yogyakarta	-	-	-	-
	D.I. Yogyakarta	383.962	141.211	48.567	573.740
3.	Perkotaan + Pedesaan				
	Kulon Progo	122.094	101.978	35.349	259.421
	Bantul	246.297	238.581	100.282	585.160
	Gunungkidul	283.684	77.969	27.791	389.444
	Sleman	191.672	309.313	166.838	667.823
	Yogyakarta	65.095	102.172	57.201	224.468
	D.I. Yogyakarta	908.842	830.013	387.461	2.126.316

Sumber: Sakernas Agustus 2020

Lampiran 13. Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Sektor/Lapangan Usaha, Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, dan Jenis Kelamin, 2020

No	Sektor/ Lapangan Usaha	≤ SLTP	SLTA	PT	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Laki-laki				
	Pertanian	156.839	58.448	12.572	227.859
	Industri	153.735	126.304	23.274	303.313
	Jasa	146.108	314.397	143.908	604.413
	Jumlah	456.682	499.149	179.754	1.135.585
2.	Perempuan				
	Pertanian	164.379	32.391	4.345	201.115
	Industri	106.497	83.993	20.207	210.697
	Jasa	181.284	214.480	183.155	578.919
	Jumlah	452.160	330.864	207.707	990.731
3.	Laki-laki + Perempuan				
	Pertanian	321.218	90.839	16.917	428.974
	Industri	260.232	210.297	43.481	514.010
	Jasa	327.392	528.877	327.063	1.183.332
	Jumlah	908.842	830.013	387.461	2.126.316

Sumber: Sakernas Agustus 2020

Lampiran 14. Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Sektor/Lapangan Usaha, Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, dan Tipe Daerah, 2020

No	Sektor/ Lapangan Usaha	≤ SLTP	SLTA	PT	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Perkotaan				
	Pertanian	125.424	53.593	12.198	191.215
	Industri	139.489	171.357	39.520	350.366
	Jasa	259.967	463.852	287.176	1.010.995
	Jumlah	524.880	688.802	338.894	1.552.576
2.	Perdesaan				
	Pertanian	195.794	37.246	4.719	237.759
	Industri	11.090	14.159	55.288	40.206
	Jasa	2.774	7.069	24.039	33.543
	Jumlah	209.658	58.474	84.046	311.508
3.	Perkotaan + Perdesaan				
	Pertanian	321.218	90.839	16.917	428.974
	Industri	13.482	35.716	105.434	105.600
	Jasa	7.034	45.590	114.450	160.318
	Jumlah	341.734	172.145	236.801	694.892

Sumber: Sakernas Agustus 2020

Lampiran 15. Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kulon Progo, 2020

No	Status Pekerjaan Utama	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Berusaha sendiri	21.795	19.634	41.429
2.	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar	31.930	21.740	53.670
3.	Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	4.305	1.316	5.621
4.	Buruh/karyawan/pegawai	49.255	37.787	87.042
5.	Pekerja bebas di pertanian	7.697	4.982	12.679
6.	Pekerja bebas di non pertanian	14.130	2.169	16.299
7.	Pekerja keluarga/tidak dibayar	9.483	33.198	42.681
	Jumlah	138.595	120.826	259.421

Sumber: Sakernas Agustus 2020

Lampiran 16. Jumlah Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama dan Tipe Daerah di Kabupaten Kulon Progo, 2020

No	Status Pekerjaan Utama	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Berusaha sendiri	15.384	26.045	41.429
2.	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar	10.950	42.720	53.670
3.	Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	547	5.074	5.621
4.	Buruh/karyawan/pegawai	29.949	57.093	87.042
5.	Pekerja bebas di pertanian	3.047	9.632	12.679
6.	Pekerja bebas di non pertanian	4.809	11.490	16.299
7.	Pekerja keluarga/tidak dibayar	6.287	36.394	42.681
Jumlah		70.973	188.448	259.421

Sumber: Sakernas Agustus 2020

Lampiran 17. Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bantul, 2020

No	Status Pekerjaan Utama	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Berusaha sendiri	57.943	44.474	102.417
2.	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar	47.101	43.573	90.674
3.	Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	21.040	8.929	29.969
4.	Buruh/karyawan/pegawai	143.950	106.704	250.654
5.	Pekerja bebas di pertanian	5.271	2.002	7.273
6.	Pekerja bebas di non pertanian	32.228	4.626	36.854
7.	Pekerja keluarga/tidak dibayar	15.206	52.113	67.319
Jumlah		322.739	262.421	585.160

Sumber: Sakernas Agustus 2020

Lampiran 18. Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Tipe Daerah di Kabupaten Bantul, 2020

No	Status Pekerjaan Utama	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Berusaha sendiri	98.108	4.309	102.417
2.	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar	80.074	10.600	90.674
3.	Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	28.364	1.605	29.969
4.	Buruh/karyawan/pegawai	233.805	16.849	250.654
5.	Pekerja bebas di pertanian	5.905	1.368	7.273
6.	Pekerja bebas di non pertanian	31.799	5.055	36.854
7.	Pekerja keluarga/tidak dibayar	58.352	8.967	67.319
	Jumlah	536.407	48.753	585.160

Sumber: Sakernas Agustus 2020

Lampiran 19. Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Gunungkidul, 2020

No	Status Pekerjaan Utama	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Berusaha sendiri	27.128	33.781	60.909
2.	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar	65.315	42.315	107.630
3.	Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	3.559	3.585	7.144
4.	Buruh/karyawan/pegawai	46.718	38.197	84.915
5.	Pekerja bebas di pertanian	3.466	2.479	5.945
6.	Pekerja bebas di non pertanian	25.694	2.745	28.439
7.	Pekerja keluarga/tidak dibayar	13.868	80.594	94.462
Jumlah		185.748	203.696	389.444

Sumber: Sakernas Agustus 2020

Lampiran 20. Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Tipe Daerah di Kabupaten Gunungkidul, 2020

No	Status Pekerjaan Utama	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Berusaha sendiri	11.108	49.801	60.909
2.	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar	9.864	97.766	107.630
3.	Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	1.767	5.377	7.144
4.	Buruh/karyawan/pegawai	24.150	60.765	84.915
5.	Pekerja bebas di pertanian	-	5.945	5.945
6.	Pekerja bebas di non pertanian	3.895	24.544	28.439
7.	Pekerja keluarga/tidak dibayar	9.526	84.936	94.462
Jumlah		60.310	329.134	389.444

Sumber: Sakernas Agustus 2020

Lampiran 21. Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sleman, 2020

No	Status Pekerjaan Utama	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Berusaha sendiri	77.394	46.808	124.202
2.	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar	51.673	46.504	98.177
3.	Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	16.718	10.468	27.186
4.	Buruh/karyawan/pegawai	171.514	129.816	301.330
5.	Pekerja bebas di pertanian	4.215	6.111	10.326
6.	Pekerja bebas di non pertanian	26.168	3.355	29.523
7.	Pekerja keluarga/tidak dibayar	23.605	53.474	77.079
Jumlah		371.287	296.536	667.823

Sumber: Sakernas Agustus 2020

Lampiran 22. Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Tipe Daerah di Kabupaten Sleman, 2020

No	Status Pekerjaan Utama	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Berusaha sendiri	123.200	1.002	124.202
2.	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar	97.075	1.102	98.177
3.	Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	27.115	71	27.186
4.	Buruh/karyawan/pegawai	297.601	3.729	301.330
5.	Pekerja bebas di pertanian	10.072	254	10.326
6.	Pekerja bebas di non pertanian	29.330	193	29.523
7.	Pekerja keluarga/tidak dibayar	76.025	1.054	77.079
Jumlah		660.418	7.405	667.823

Sumber: Sakernas Agustus 2020

Lampiran 23. Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Yogyakarta, 2020

No	Status Pekerjaan Utama	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Berusaha sendiri	31.670	24.892	56.562
2.	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar	11.510	12.077	23.587
3.	Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	8.344	2.786	11.130
4.	Buruh/karyawan/pegawai	54.248	46.462	100.710
5.	Pekerja bebas di pertanian	-	-	-
6.	Pekerja bebas di non pertanian	3.503	2.697	6.200
7.	Pekerja keluarga/tidak dibayar	7.941	18.338	26.279
Jumlah		117.216	107.252	224.468

Sumber: Sakernas Agustus 2020

Lampiran 24. Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Tipe Daerah di Kota Yogyakarta, 2020

No	Status Pekerjaan Utama	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Berusaha sendiri	56.562	-	56.562
2.	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar	23.587	-	23.587
3.	Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	11.130	-	11.130
4.	Buruh/karyawan/pegawai	100.710	-	100.710
5.	Pekerja bebas di pertanian	-	-	-
6.	Pekerja bebas di non pertanian	6.200	-	6.200
7.	Pekerja keluarga/tidak dibayar	26.279	-	26.279
Jumlah		224.468	-	224.468

Sumber: Sakernas Agustus 2020

Lampiran 25. Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2020

No	Status Pekerjaan Utama	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Berusaha sendiri	215.930	169.589	385.519
2.	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar	207.529	166.209	373.738
3.	Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	53.966	27.084	81.050
4.	Buruh/karyawan/pegawai	465.685	358.966	824.651
5.	Pekerja bebas di pertanian	20.649	15.574	36.223
6.	Pekerja bebas di non pertanian	101.723	15.592	117.315
7.	Pekerja keluarga/tidak dibayar	70.103	237.717	307.820
Jumlah		1.135.585	990.731	2.126.316

Sumber: Sakernas Agustus 2020

Lampiran 26. Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Tipe Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2020

No	Status Pekerjaan Utama	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Berusaha sendiri	304.362	81.157	385.519
2.	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar	221.550	152.188	373.738
3.	Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	68.923	12.127	81.050
4.	Buruh/karyawan/pegawai	686.215	138.436	824.651
5.	Pekerja bebas di pertanian	19.024	17.199	36.223
6.	Pekerja bebas di non pertanian	76.033	41.282	117.315
7.	Pekerja keluarga/tidak dibayar	176.469	131.351	307.820
Jumlah		1.552.576	573.740	2.126.316

Sumber: Sakernas Agustus 2020

Lampiran 27. Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, 2020

No	Status Pekerjaan Utama	Tingkat Pendidikan			Jumlah
		≤ SLTP	SLTA	PT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Laki-laki				
	Berusaha Sendiri	83.795	97.037	35.098	215.930
	Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/ Buruh Tidak Dibayar	135.278	59.742	12.509	207.529
	Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar	18.152	22.428	13.386	53.966
	Buruh/Karyawan/Pegawai	102.588	251.139	111.958	465.685
	Pekerja Bebas di Pertanian	16.067	4.582	-	20.649
	Pekerja Bebas di Non pertanian	67.596	33.042	1.085	101.723
	Pekerja keluarga/tak dibayar	33.206	31.179	5.718	70.103
	Jumlah	456.682	499.149	179.754	1.135.585
2.	Perempuan				
	Berusaha Sendiri	87.960	60.449	21.180	169.589
	Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar	105.285	52.021	8.903	166.209
	Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar	8.580	10.459	8.045	27.084
	Buruh/Karyawan/Pegawai	76.670	133.470	148.826	358.966
	Pekerja Bebas di Pertanian	13.624	1.950	-	15.574
	Pekerja Bebas di Non pertanian	8.740	6.282	570	15.592
	Pekerja keluarga/tak dibayar	151.301	66.233	20.183	237.717
	Jumlah	452.160	330.864	207.707	990.731

Sumber: Sakernas Agustus 2020

Lampiran 28. Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Tipe Daerah, 2020

No	Status Pekerjaan Utama	Tingkat Pendidikan			Jumlah
		≤ SLTP	SLTA	PT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Perkotaan				
	Berusaha Sendiri	114.039	136.933	53.390	304.362
	Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar	116.713	86.870	17.967	221.550
	Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar	20.953	27.808	20.162	68.923
	Buruh/Karyawan/Pegawai	131.889	329.204	225.122	686.215
	Pekerja Bebas di Pertanian	16.315	2.709	-	19.024
	Pekerja Bebas di Non pertanian	42.134	32.244	1.655	76.033
	Pekerja keluarga/tak dibayar	82.837	73.034	20.598	176.469
	Jumlah	524.880	688.802	338.894	1.552.576
2.	Pedesaan				
	Berusaha Sendiri	57.716	20.553	2.888	81.157
	Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar	123.850	24.893	3.445	152.188
	Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar	5.779	5.079	1.269	12.127
	Buruh/Karyawan/Pegawai	47.369	55.405	35.662	138.436
	Pekerja Bebas di Pertanian	13.376	3.823	-	17.199
	Pekerja Bebas di Non pertanian	34.202	7.080	-	41.282
	Pekerja keluarga/tak dibayar	101.670	24.378	5.303	131.351
	Jumlah	383.962	141.211	48.567	573.740

Sumber: Sakernas Agustus 2020

Lampiran 29. Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di D.I. Yogyakarta, 2020

No	Status Pekerjaan Utama	Tingkat Pendidikan			Jumlah
		≤ SLTP	SLTA	PT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Berusaha Sendiri	171.755	157.486	56.278	385.519
2.	Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar	240.563	111.763	21.412	373.738
3.	Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar	26.732	32.887	21.431	81.050
4.	Buruh/Karyawan/Pegawai	179.258	384.609	260.784	824.651
5.	Pekerja Bebas di Pertanian	29.691	6.532	-	36.223
6.	Pekerja Bebas di Non pertanian	76.336	39.324	1.655	117.315
7.	Pekerja keluarga/tak dibayar	184.507	97.412	25.901	307.820
Jumlah		908.842	830.013	387.461	2.126.316

Sumber: Sakernas Agustus 2020

**Lampiran 30. Jumlah Pekerja/Karyawan Menurut Sektor Usaha,
Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, 2020**

No	Sektor Usaha	Tingkat Pendidikan			Jumlah
		≤ SLTP	SLTA	PT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Laki-laki				
	Pertanian	27.740	6.850	420	35.010
	Industri	106.266	94.233	13.419	213.918
	Jasa	52.245	187.680	99.204	339.129
	Jumlah	186.251	288.763	113.043	588.057
2.	Perempuan				
	Pertanian	15.624	2.991	476	19.091
	Industri	27.935	42.259	7.116	77.310
	Jasa	55.475	96.452	141.804	293.731
	Jumlah	99.034	141.702	149.396	390.132
3.	Laki-laki + Perempuan				
	Pertanian	43.364	9.841	896	54.101
	Industri	134.201	136.492	20.535	291.228
	Jasa	107.720	284.132	241.008	632.860
	Jumlah	285.285	430.465	262.439	978.189

Sumber: Sakernas Agustus 2020

Lampiran 31. Jumlah Pekerja/Karyawan Menurut Sektor Usaha, Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Tipe Daerah, 2020

No	Sektor Usaha	Tingkat Pendidikan			Jumlah
		≤ SLTP	SLTA	PT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Perkotaan				
	Pertanian	23.958	5.034	688	29.680
	Industri	85.073	113.362	19.479	217.914
	Jasa	81.307	245.761	206.610	533.678
	Jumlah	190.338	364.157	226.777	781.272
2.	Pedesaan				
	Pertanian	19.406	4.807	208	24.421
	Industri	49.128	23.130	1.056	73.314
	Jasa	26.413	38.371	34.398	99.182
	Jumlah	94.947	66.308	35.662	196.917
3.	Perkotaan + Pedesaan				
	Pertanian	43.364	9.841	896	54.101
	Industri	134.201	136.492	20.535	291.228
	Jasa	107.720	284.132	241.008	632.860
	Jumlah	285.285	430.465	262.439	978.189

Sumber: Sakernas Agustus 2020

Lampiran 32. Upah Minimum Provinsi Menurut Provinsi, 2020-2021

No	Provinsi	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	DKI Jakarta	4.276.349	4.416.186
2.	Papua	3.516.700	3.516.700
3.	Sulawesi Utara	3.310.722	3.310.723
4.	Bangka Belitung	3.230.022	3.230.023
5.	Papua Barat	3.184.225	3.134.600
6.	NAD	3.165.030	3.165.031
7.	Sulawesi Selatan	3.103.800	3.165.876
8.	Sumatera Selatan	3.043.111	3.043.111
9.	Kepulauan Riau	3.005.383	3.005.460
10.	Kalimantan Utara	3.000.803	3.000.804
11.	Kalimantan Timur	2.981.378	2.981.378
12.	Kalimantan Tengah	2.890.093	2.903.144
13.	Riau	2.888.563	2.888.564
14.	Kalimantan Selatan	2.877.447	2.877.488
15.	Maluku Utara	2.721.530	2.721.530
16.	Jambi	2.630.161	2.630.162
17.	Maluku	2.604.960	2.604.961
18.	Gorontalo	2.586.900	2.788.826
19.	Sulawesi Barat	2.571.328	2.678.863
20.	Sulawesi Tenggara	2.552.014	2.552.014

No	Provinsi	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
21.	Sumatera Utara	2.499.422	2.499.423
22.	Bali	2.493.523	2.494.000
23.	Sumatera Barat	2.484.041	2.484.041
24.	Banten	2.460.968	2.460.996
25.	Lampung	2.431.324	2.432.001
26.	Kalimantan Barat	2.399.698	2.399.698
27.	Sulawesi Tengah	2.303.710	2.303.711
28.	Bengkulu	2.213.604	2.215.000
29.	NTB	2.183.883	2.183.883
30.	NTT	1.945.902	1.950.000
31.	Jawa Barat	1.810.350	1.810.351
32.	Jawa Timur	1.768.777	1.868.777
33.	Jawa Tengah	1.742.015	1.798.979
34.	D.I. Yogyakarta	1.704.607	1.765.000
	Rata-rata	2.664.187	2.684.744

Sumber: *kompas.com-09/01/2021*

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2021). Keadaan Angkatan Kerja Daerah Istimewa Yogyakarta Agustus 2020. Yogyakarta : BPS Daerah Istimewa Yogyakarta.

_____. 2020. Keadaan Angkatan Kerja Daerah Istimewa Yogyakarta Agustus 2019. BPS Daerah Istimewa Yogyakarta.

_____. 2020. Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia Februari 2020. Badan Pusat Statistik, Jakarta.

Al Hikam, Herdi Alif. 2021. Lengkap! Rincian UMP 2021 di 34 Provinsi. <https://finance.detik.com>. Diakses 2 Pebruari 2021

Hamdani, Trio. 2019. UMP 2020 Naik 8,51%, dari Mana Rumusnya? <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4749525/ump-2020-naik-851-dari-mana-rumusny>. Diakses 2 Pebruari 2020.

Hartomo, Giri. 2020. Kena PHK Imbas Covid-19, Banyak Orang Kota Pulang Kampung Jadi Petani. <https://ekbis.sindonews.com/read/243594/34/kena-phk-imbis-covid-19-banyak-orang-kota-pulang-kampung-jadi-petani-1606198312>. Diakses 8 Pebruari 2021

Indriani, Maulida, 2016. Peran Tenaga Kerja Indonesia dalam Pembangunan Ekonomi Nasional.
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/3644>.

-----, 2018. Hasil Survei Upah Buruh dan Biaya Hidup di Empat Kota di Provinsi Guangdong, China. <http://ksn.or.id/hasil-survei-upah-buruh-dan-biaya-hidup-di-empat-kota-di-provinsi-guangdong-china/>. Diakses 20 Maret 2019.

Rahartono, Tiara. 2019. Permasalahan Tenaga Kerja di Indonesia. https://www.academia.edu/34590167/PermasalahanTenaga_Kerja_di_Indonesia. Diakses 4 Pebruari 2019

Rizal, Jawahir Gustav, 2021. Daftar Lengkap UMP 2021 di 34 Provinsi Indonesia: DKI Jakarta Tertinggi, DIY Terendah. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/09>. Diakses 15 Pebruari 2021

Romli, Lili. 2020. Covid-19 dan Modal Sosial. <HTTP://WWW.POLITIK.LIPI.GO.ID/KOLOM/KOLOM-2/POLITIK-NASIONAL/1401-COVID-19-DAN-MODAL-SOSIAL>. Diakses 25 Februari 2021.

Sugianto, Danang. 2020. PHK Tak Terbandung, Bahaya Gelombang Kemiskinan Baru. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5011381/phk-tak-terbandung-bahaya-gelombang-kemiskinan-baru>. Diakses 8 Februari 2021.

Satria, Budi. 2018. Bagaimana Tata Cara Penetapan UMP di Indonesia. <https://www.kompasiana.com/budisatria/5c05264c6ddcae0b306c54e3/bagaimana-tata-cara-penetapan-ump-di-indonesia>. Diakses 10 Februari 2020.

Yustika, Ahmad Erani, 2020. Pengangguran dan Informalisasi Ekonomi. <https://nasional.sindonews.com/read/233090/18/pengangguran-dan-informalisasi-ekonomi-1605445911>. Diakses 8 Februari 2021

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://yogyakarta.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI D.I. YOGYAKARTA**

Jl. Brawijaya, Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Banti 55183 - Telp. : (0274) 4342234 Hunting
Fax. : (0274) 4342230 - E-mail : bps3400@bps.go.id Homepage : yogyakarta.bps.go.id

